ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

7011 111-1

MENUJU INDONESIA MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA



Disampaikan pada Sidang Universitas Airlangga Dalam Rangka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi

Surabaya, 26 Agustus 2013

Oleh

CHAIRUL TANJUNG



Buku ini khusus dicetak dan diperbanyak untuk acara Pengukuhan Doktor Honoris Causa di Universitas Airlangga Tanggal 26 Agustus 2013

PIDATO GURU BESARMENUJU INDONESIA MAJU... CHAIRUL TANJUNG

Menuju Indonesia Maju, Berkeadilan dan Sejahtera Untuk Semua

Chairul Tanjung



Yang saya hormati,

Para Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Yang Mulia Para Duta Besar Negara Sahabat,

Para Wakil Menteri dan Pejabat Setingkat Eselon I dari berbagai Kementerian/Lembaga, khususnya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Wakil Ketua dan Rekan-rekan Anggota Komite Ekonomi Nasional, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur beserta segenap Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili, Para Bupati/Walikota se-Provinsi Jawa Timur atau yang mewakili,

Ketua dan Para Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga, Rektor dan Para Wakil Rektor Universitas Airlangga, Para Rektor dari Universitas lain yang berkesempatan hadir pada saat ini,

Ketua dan para Anggota Senat Akademik Universitas Airlangga, Ketua dan para Anggota Dewan Guru Besar Universitas Airlangga, Para Guru Besar Tamu dari berbagai Universitas di Indonesia Para Dekan dan Wakil Dekan se-Universitas Airlangga, Para Staf Pengajar, Karyawan, dan seluruh Mahasiswa Universitas Airlangga,

Para Undangan dan Hadirin yang saya muliakan,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kita semua dapat berkumpul di Ruang Garuda Mukti Universitas Airlangga pada hari ini untuk mengikuti acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa Bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga kepada saya. Karena itu di kesempatan pertama ini ijinkan saya menghaturkan rasa terima kasih yang dalam dan tulus kepada seluruh Hadirin yang telah meluangkan waktu menghadiri upacara ini.

Sebagaimana yang telah menjadi kelaziman, penerima Gelar Doktor Honoris Causa diminta menyampaikan pemikirannya yang menjadi Causa Prima dari penganugerahan Gelar terhormat ini. Karena itu ijinkan saya pada saat ini menyampaikan beberapa pokok pemikiran saya yang saya beri judul:

Menuju Indonesia Ma<mark>ju,</mark> Berkea<mark>dila</mark>n dan Sejahtera Untuk Semua

1 | Landasan Filosofis | Pembangunan Indonesia

Para hadirin yang saya muliakan,

Indonesia saat ini tercatat sebagai kekuatan ekonomi di peringkat 16 besar ekonomi dunia. Ke depan, beberapa lembaga telah memproyeksikan Indonesia masuk ke peringkat atas ekonomi dunia. Yayasan Indonesia Forum (2007) memproyeksikan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nomor 5 dunia di tahun 2030. Ketika pertama kali disampaikan, banyak pihak tidak percaya kepada proyeksi yang dianggap terlalu optimis. Namun seiring berjalannya waktu, banyak lembaga internasional lainnya melihat potensi ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah McKinsey Global Institute (2012) yang memproyeksikan Indonesia akan menjadi kekuatan nomor 7 di dunia pada tahun 2025.

Tentunya, menja<mark>di Negara maju adalah cita-cit</mark>a seluruh bangsa. Cita-cita tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yang cuplikannya:

"... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ..."

Selanjutnya, Sila ke-5 dari Dasar Negara Pancasila secara spesifik mengamanatkan Indonesia untuk mewujudkan:

'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'.

Sila inilah yang sesungguhnya menjadi landasan filosofis dari pendekatan ekonomi kesejahteraan bagi Indonesia. Harus dipahami bahwa 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakvat Indonesia' memiliki arti yang sangat luas. Kita sering mengartikan 'Keadilan' semata dalam konteks hukum. Namun saya berkeyakinan bahwa 'Keadilan Sosial' juga memiliki manifestasi dalam konteks ekonomi. 'Keadilan Sosial' juga berarti pemerataan pembangunan ekonomi dan seluruh hasil-hasilnya bagi seluruh elemen masyarakat. Makna 'inklusif' sesungguhnya ada dalam Pancasila. Saya juga mengartikan bahwa pemerataan pembangunan Indon<mark>esia ha</mark>rusla<mark>h</mark> pemerataan y<mark>ang me</mark>nsejahterakan. Karenanya, kita menginginkan Pemerataan sekaligus Kemajuan. Jika literatur Ilmu Ekonomi pernah mendikotomikan dua konsep pemerataan dan pertumbuhan, bagi Pembangunan Indonesia saya yakini keduanya bisa k<mark>ita raih</mark> sekaligus. Inilah hakekat d<mark>ari pok</mark>ok pemikiran dari pidato ini, yaitu Menuju Indonesia Maju, Berkeadilan dan Sejahtera Bagi Semua.

Dalam konteks tersebut dapat dipahami bahwa Proses Pembangunan adalah proses memperbanyak pilihan bagi individu, perusahaan, dan masyarakat. Sementara itu tugas Negara adalah memberikan kesempatan, keberpihakan, dan akses bagi individu, perusahaan, masyarakat untuk memanfaatkan pilihan. Keseluruhannya itu adalah untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan: Tumbuh Bersama, Sejahtera Bersama.

Untuk tumbuh bersama dan sejahtera bersama, diperlukan pendekatan holistik. Kita berbicara mengenai cara pandang melihat Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, sosial-politik, dan geografis. Tiga cara pandang kesatuan Indonesia ini sangat penting untuk dipahami dalam

upaya melakukan tranformasi pembangunan Indonesia. Tranformasi itu sendiri secara kontinyu perlu memperhatikan empat kondisi yang ada, yaitu:

- 1. struktur penduduk,
- 2. kekayaan alam (natural endowment),
- 3. kondisi domestik, dan juga
- 4. kondisi eksternal dan global



Model Ekonomi Kesejahteraan: Perbandingan Antarnegara

Para hadirin yang saya muliakan,

Sebelum saya menguraikan lebih dalam mengenai Indonesia, saya rasa tidak ada salahnya kita melihat beberapa model pembangunan ekonomi yang dijalankan di beberapa negara lain di dunia. Saya hanya akan membandingkan secara ringkas kondisi di 4 (empat) negara yang saya rasa memiliki kekhususan dan pembelajaran bagi Indonesia.



Pertama adalah Swedia. Swedia adalah salah satu negara di kawasan Skandinavia, kawasan yang terkenal dengan konsep negara kesejahteraan. Swedia pada tahun 2012 tercatat memiliki 9,5 juta penduduk dengan PDB sebesar USD 538,1 miliar, dengan sumbangan sektor jasa mencapai 72% dari total PDB. Hal tersebut berarti pendapatan perkapita mencapai USD 57 ribu di tahun 2012. Pada tahun 1980 yang lalu, Swedia memiliki pendapatan perkapita sebesar USD 16 ribu. Hal ini berarti peningkatan sebesar 3,5 kali lipat dalam periode selama 2 dekade. Pada tahun 2011, tingkat pengangguran di Swedia tercatat sebesar 7,8%.

Swedia adalah negara yang mendorong peningkatan kesejahteraan dengan fokus industri berbasis IPTEK dan berorientasi ekspor. Swedia bertransformasi dari negara yang bergantung pada hasil alam menjadi negara berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, dan mendorong ekspor manufaktur. Di dunia internasional, Swedia dikenal sebagai negara asal dari berbagai merek ternama dunia, seperti Volvo, Ericsson, IKEA, H&M, dll. Swedia menganut sistem ekonomi terbuka secara global dan memiliki sistem regulasi yang sangat transparan. Pemerintah membiayai jaminan sosial dari penerimaan pajak. Namun demikian, Pemerintah menjalankan decisive corporate tax reform, yang berdampak pada rendahnya pajak perusahaan sehingga meningkatkan produktivitas sektor swasta.

Pembelajaran dari Swedia tentu tidak dapat sepenuhnya kita anggap relevan dengan kondisi yang dihadapi Indonesia. Swedia adalah negara dengan penduduk yang jauh lebih sedikit dari Indonesia. Secara geografis, Swedia hanya 2,3% dari total luas Indonesia. Namun demikian transformasi Swedia dari negara yang bergantung pada hasil alam menjadi negara berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia.



Negara berikutnya adalah Taiwan. Taiwan pada tahun 2012 memiliki penduduk sekitar 23 juta dengan total PDB sebesar USD 474 miliar. Kontribusi sektor jasa di Taiwan mencapai lebih dari 65%. Tingkat pengangguran di Taiwan berada di tingkat yang relatif rendah, yaitu 4,2% di tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2013 masih diperkirakan di sekitar 3,5%, suatu tingkat yang sangat tinggi bagi perekonomian dengan pendapatan perkapita mencapai USD 21 ribu.

Taiwan adalah salah satu negara yang sejak awal dekade 1990an disebut sebagai *East Asia Miracle*ⁱ. Kedelapan negara yang termasuk dalam *East Asia Miracle* tersebut dianggap dapat menjaga pertumbuhan ekonominya pada tingkat yang sangat tinggi untuk kurun waktu yang cukup lama, dan pada saat yang bersamaan juga mampu untuk mengurangi kesenjangan pendapatannya.

Taiwan mengembangkan sistem ekonomi yang berfokus pada pasar internasional. Ekspor didorong terus. Secara internal, pembangunan didasarkan atas administrasi pertanahan yang efisien. Perencanaan dan pengendalian bangunan fisik perumahan yang efektif berada di tangan pemerintah. Sektor konstruksi pun didukung oleh pengadaan semen murah dan berkualitas melalui dukungan riset. Di sisi pendidikan, Taiwan memiliki kebijakan pendidikan yang visioner, dengan perhatian yang sangat besar terutama perhatian terhadap anakanak keluarga petani.

Sekali lagi, pelajaran dari Taiwan tidak serta merta sepenuhnya relevan bagi Indonesia. Penduduk Taiwan tidak sampai 10% penduduk Indonesia, luas wilayahnya pun hanya setengah dari Pulau Jawa. Begitu pula, kekuatan politik Taiwan di dunia internasional juga lebih terbatas. Namun demikian satu pembelajaran yang sangat penting diambil dari kasus Taiwan adalah adanya budaya dan pola pikir maju. Satu negara tidak akan menjadi negara maju jika penduduknya tidak memiliki budaya dan pola pikir maju ini.



Satu kasus lain lagi adalah Korea Selatan. Di tahun 2012, Korea memiliki penduduk sekitar 50 juta orang, namun merupakan negara eksportir ke-6 terbesar di dunia dengan tingkat pengangguran hanya 3,8%. PDB Korea Selatan di tahun 2012 tercatat sebesar USD 1,2 triliun, dengan kontribusi sektor jasa sebesar 58,2% dari total PDB (2010).

Di Korea, budaya dan pola pikir maju menjadi faktor menciptakan kesejahteraan. Korea Selatan mulai menapak kesuksesan ekonomi sejak akhir tahun 1980an, dengan fokus pada pemanfaatan teknologi dan ekonomi kreatif. Walaupun krisis ekonomi Asia di akhir dekade 1990an memberi imbas yang sangat signifikan kepada Korea Selatan, namun Korea Se-

latan diakui sebagai salah satu perekonomian Asia yang dapat pulih dari situasi krisis tersebut dengan relatif cepat.

Perekonomian Korea Selatan berorientasi pada pasar. Transformasi ekonomi dari basis industri dengan *high labor intensive* menjadi basis ekonomi masa depan. Salah satu kunci lainnya dari kebangkitan ekonomi Korea adalah efisiensi birokrasi, yang juga dimungkinkan oleh aplikasi teknologi dalam pengelolaan pemerintahan. Di sisi pendidikan, Korea Selatan mengutamakan aplikasi matematika dan sains terapan sejak tahun 1970.

Sekali lagi, Korea Selatan memang adalah satu model perekonomian yang dapat memberi pembelajaran bagi transformasi ekonomi Indonesia. Namun tidak seluruhnya pula relevan. Faktor demografis dan geografis Korea Selatan amat berbeda dengan Indonesia. Namun yang perlu benar-benar menjadi pembelajaran bagi Indonesia adalah mengenai budaya dan pola pikir. Korea Selatan menjadi negara maju karena mampu mengubah budaya dan pola pikir bangsanya dari budaya dan pola pikir negara berkembang menjadi budaya dan pola pikir masyarakat maju.



Studi kasus terakhir yang akan diuraikan di sini adalah negara Malaysia, yang dalam beberapa waktu belakangan mulai menunjuk-

kan kondisi berada dalam jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Sejak mendapatkan kemerdekaan di tahun 1957, Malaysia telah mencetak perbaikan kemiskinan dan menjadi negara berpenghasilan menengah. Akan tetapi, kondisi perekonomian Malaysia relatif mengalami stagnasi selama 20 tahun terakhir.

Beberapa kebijakan strategis yang dijalankan di Malaysia ternyata memiliki dampak positif maupun negatif di negara tersebut. Kebijakan Bumiputera membedakan akses kesempatan di tengah masyarakat berdasarkan etnis. Hal ini tidak dapat dipungkiri menjadi penghalang

pertumbuhan kelompok-kelompok etnis non-Melayu. Malaysia juga mendorong pendidikan, bahkan di bidang pendidikan tinggi Malaysia amat mendorong masyarakatnya untuk menuntut pendidikan di luar negeri dengan memberikan beasiswa. Kebijakan ini memberi dampak positif peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun pada saat yang bersamaan juga membawa potensi *brain-drain*.

Pertumbuhan ekonomi Malaysia salah satunya difasilitasi oleh tumbuhnya industri manufaktur. Namun keunggulan di industri manufaktur akibat keunggulan komparatif tenaga kerja dan sumber daya alam tidak bisa berlangsung selamanya. Upah tenaga kerja akan meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Karena itu keunggulan harus didasarkan bukan saja kepada produktivitas namun juga kepada inovasi. Persaingan di dunia internasional sangat sulit dimenangkan apabila hanya mengandalkan sektor manufaktur padat karya. Di sisi lain, Malaysia tidak cukup cepat beralih kepada upaya peningkatan inovasi. Rendahnya alokasi anggaran untuk pembiayaan riset pengembangan teknologi mengakibatkan Malaysia akhirnya tidak bisa keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah tadi.

3 | Dinamika Strategi Pembangunan Seiring Pergantian Kepemimpinan Nasional

Para hadirin yang saya muliakan,

Beberapa pengalaman negara lain di atas dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam menentukan Strategi Pembangunan menciptakan Indonesia Maju dan Sejahtera Bagi Semua. Strategi Pembangunan bagi saya adalah satu Bauran Kebijakan, bukan sekadar kumpulan Strategi Sektoral. Bauran Kebijakan kita ke depan tidak bisa lepas dari perspektif sejarah kebijakan pembangunan Indonesia.

Saya meyakini bahwa kebijakan yang diambil dalam setiap periode masa kepemimpinan Presiden Indonesia adalah yang paling tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi pada saat itu. Karena itu tidak tepat jika dalam melihat perspektif sejarah kebijakan ekonomi Indonesia, kita kemudian terfokus kepada kekurangan atau kelemahan kebijakan yang telah diambil. Setiap periode pemerintahan memiliki keinginan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Situasi riil yang dihadapi tentunya bisa berbeda-beda dari satu periode ke periode lainnya, dan hal tersebutlah yang membedakan satu pemimpin dari pemimpin yang lain. Uraian mendalam mengenai pemikiran dan permasalahan ekonomi Indonesia sejak 1945-2005 dapat dilihat dalam Soesastro et al. (2005).

Masa Presiden Soekarno (Agustus 1945 - Maret 1967)

Ir. Soekarno

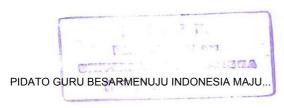


Agustus 1945 - Maret 1967

Presiden Soekarno memimpin Indonesia mencapai kemerdekaan dan kedaulatan penuh. Situasi ini memerlukan kondisi yang relatif sentralistis. Di sisi kebijakan ekonomi, sejak pasca kemerdekaan sampai dengan periode tahun 1950-an Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin sehingga struktur ekonomi Indonesia menjurus dimana pada sistem etatisme, peran pemerintah pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur pertumbuhan ekonomi (pembangunan semesta ber<mark>encana</mark>). Model ini tidak berhasil menumbuhkan kese-

jahteraan secara signifikan, karena begitu kompleksnya permasalahan ekonomi, sosial, politik dan keamanan yang dihadapi pemerintah yang ingin diselesaikan secara bersama-sama dan simultan. Fokus utama pada kehidupan politik akhirnya menyebabkan perekonomian tidak tertangani dengan baik.

Pada masa pemerintahan Orde Lama, pemerintah yang terbalut erat dengan agenda politik berakibat pada ketidakstabilan perekonomian nasional. Banyak kebijakan berorientasi pada target politik jangka pendek dan lebih 'berorientasi ke dalam'. Puncaknya adalah hiper inflasi yang mencapai lebih 600% pada tahun 1965-1966, serta krisis bahan pokok seperti beras dan komoditas pangan lainnya.



Harus diakui bahwa capaian utama periode pemerintahan Presiden Soekarno adalah kemampuan menjaga kesatuan Indonesia di awal kelahirannya. Di bawah masa Presiden Soekarno, Indonesia mendapatkan pengakuan internasional, dan secara internal, seluruh komponen bangsa mengakui Satu Kesatuan Indonesia.

Masa Presiden Soeharto (Maret 1967 - Mei 1998)

Soeharto



Maret 1967 - Mei 1998

Di awal kepemimpinan Presiden Soeharto, target utama Pemerintah adalah memperbaiki kondisi ekonomi pasca Orde Lama. Filosofi perbaikan ini dituangkan dalam apa yang disebut dengan Trilogi Pembangunan, yaitu

- (i) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,
- (ii) Pertumbu<mark>han ek</mark>onomi yang cukup tinggi, dan
- (iii) Stabilita<mark>s nasion</mark>al yang sehat dan dinamis.

Pola dasar pembangunan nasional disusun berdasarkan pola pem-

bangunan jangka pendek lima tahunan (Pelita)". Sektor pertanian mendapatkan perhatian utama, dan salah satu puncaknya adalah tercapainya swasembada beras di pertengahan dekade 1980.

Indonesia menyadari bahwa tidak mungkin membangun dengan menggunakan kekuatan sendiri. Sejak awal, Indonesia memiliki orientasi 'ke luar', memanfaatkan sumber-sumber luar negeri. Di masa awal pemerintahan Orde Baru, hal ini dituangkan dalam UU Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967.

Di periode awal Orde Baru, Pemerintah Presiden Soeharto mengambil dua kebijakan strategis utama. Pertama adalah pengendalian jumlah penduduk melalui Program Keluarga Berencana sejak awal dekade 1970an. Kebijakan ini ditekuni dengan serius, sehingga berhasil mengurangi laju pertumbuhan penduduk Indonesia secara signifikan dalam 3-4 dekade berikutnya. Kebijakan Keluarga Berencana yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia kemudian menjadi referensi praktek terbaik internasional di akhir dekade 1980an dan awal 1990an. Untuk diskusi kebijakan mengenai program Keluarga Berencana, khususnya peran Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (Hull dan Hull, 2004) dan juga (Adioetomo, 2004)

Kebijakan strategis kedua yang dijalankan oleh Pemerintahan Orde Baru adalah menggunakan uang hasil ekspor minyak bumi untuk pembangunan infrastruktur perdesaan, melalui beragam program Inpres (Instruksi Presiden). Dengan program ini, pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, dan infrastruktur lainnya termasuk reboisasi hutan, mendapatkan perhatian utama di seluruh Indonesia. Sumber lain pembiayaan pembangunan diperoleh dengan mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, di samping mencari bantuan kredit luar negeri. Diskusi mendalam berbagai aspek mengenai perekonomian Indonesia selama Orde Baru. (Hill, 1996)

Kebijakan pembangunan di masa Orde Baru menekankan kepada pencapaian hasil. Hal ini tidak lepas dari sifat sentralistis di mana seluruh komponen harus mampu menunjukkan keberhasilan. Pentingnya proses yang efisien, taat azas, akuntabel, partisipatif, harus diakui bukanlah 'jargon' dalam pemerintahan Orde Baru. Hal ini kemudian menjadi sebab dari defisit anggaran pemerintah yang selalu meningkat hingga puncaknya pada menjelang krisis 1998. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru di tahun 1998.

Masa Presiden B.J. Habibie (Mei 1998 - Oktober 1999)





Mei 1998 - Oktober 1999

Masa singkat pemerintahan Presiden Habibie adalah periode transisi Indonesia keluar dari krisis ekonomi dan politik di akhir dekade 1990an. Periode transisi yang singkat ini meletakkan dasar dari beragam reformasi yang kemudian terus bergulir setelah Presiden Habibie menyelesaikan masa jabatannya di Oktober 1999.

Pemerintahan Presiden Habibie melakukan perbaikan dan rekonstruksi perek<mark>onomia</mark>n Indonesia, melalui restrukturisasi atau rekapitulasi perbankan secara besarbesaran dan meletakkan dasar dari persaingan sehat. Reformasi eko-

nomi dilakukan <mark>dengan mem</mark>berlakukan beberapa Undang - Undang yang mendukung persaingan sehat, seperti Undang-undang (UU) Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat serta UU Perlindungan Konsumen. Undang-undang yang mengatur pemerintah daerah dan desentralisasi fiskal juga pertama kali dikeluarkan di periode pemerintahan ini. Reformasi lainnya adalah pengaturan baru atas media massa dan serikat pekerja.

Di sisi lain, Indonesia saat itu juga dihadapkan kepada gejolak ekonomi yang mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat miskin dan rentan. Pada masa inilah dimulai adanya cikal bakal dari program perlindungan sosial dalam bentuk operasi pasar khusus, kebijakan penyerapan tenaga kerja untuk pekerjaan padat karya, dsb.

Kebijakan seperti ini menjadi dasar dari kebijakan perlindungan sosial Indonesia di masa berikutnya. PIDATO GURU BESAR MENUJU INDONESIA MAJU...

CHAIRUL TANJUNG

Masa Presiden Abdurrahman Wahid (Oktober 1999 - Juli 2001)

KH Abdurrahman Wahid



Oktobe<mark>r 1999 –</mark> Juli 2001

Pemerintahan Gus Dur dimulai dengan restrukturisasi lembaga pemerintahan yang dianggap tidak efisien. Reformasi juga terus dilanjutkan melalui penggalakkan demokrasi dan keterbukaan dalam kehidupan sosial, serta menguatkan dan meluaskan kerja sama bilateral dengan luar negeri. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, Gus Dur membawa Indonesia kepada penghormatan atas nilainilai pluralisme dan multikulturalisme.

Masa Presiden Megawati Soekarnoputri (Juli 2001 - Oktober 2004)

Megawati Soekamoputri



Juli 2001 - Oktober 2004

Megawati Soekarnoputri meneruskan sisa masa jabatan Presiden Abdurrahman Wahid sampai tahun 2004. Pada era ini, pemerintah terus melanjutkan privatisasi BUMN sebagai upaya penyehatan kondisi keuangan negara. Pengembangan 'ekonomi kerakyatan' yang dalam rangka memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat ketahanan ekonomi sosial (menekan defisit anggaran dan perbaikan kinerja ekspor), penekanannya dilakukan melalui pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Pada era ini, pembangunan fisik relatif terbatas. Kendati kondisi ekonomi sudah mulai lebih membaik, namun rata-rata angka pertumbuhan masih pada kisaran angka 4.6% per tahun. Pada masa pemerintah Presiden Megawati pula diterbitkan UU Ketenagakerjaan pada tahun 2003, menandai kebijakan tenaga kerja yang jauh lebih menekankan perlindungan kepada pekerja. Pada akhir masa jabatannya, Presiden Megawati juga mengeluarkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menjadi landasan dari program Jaminan Sosial ke depannya. Sampai dengan saat ini, Sistem Jaminan Sosial Nasional ini masih belum dapat terlaksana sepenuhnya. Salah satunya adalah karena dalam proses persiapannya, SJSN tersebut tidak dilengkapi dengan perhitungan aktuaria (baik di tingkat mikro dan makro) yang memadai.

Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Oktober 2004 - Oktober 2014)





Oktober 2004 - sekarang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah Presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Pemerintahan Presiden SBY sejak 2004 berangkat dengan empat pilar utama strategi pembangunan ekonomi, yaitu Pro-Growth, Pro-Poor, Pro-Job, dan Pro-Environment, yang kemudian dikenal dengan istilah pembangunan ekonomi berkelanjutan dan merata (sustainable growth with equity).

Di masa kepemimpinannya, SBY menghadapi beberapa periode krisis. Krisis harga minyak internasional di tahun 2005 mengharuskan Indonesia mengurangi subsidi BBM secara signifikan. Masyarakat tidak mampu mendapatkan kompensasi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan program transfer tunai pertama kali dilakukan dalam skala nasional di Indonesia. Transfer tunai ini, bersama-sama dengan program lainnya menjadi katup penyelamat kelompok tidak mampu menghadapi krisis. Krisis berikutnya adalah di tahun 2008 yang juga berakibat pada peningkatan harga BBM. Sekali lagi, program transfer tunai kepada masyarakat tidak mampu menjadi program kompensasi.

Sejak tahun 2009, Pemerintahan SBY merumuskan program penanggulangan kemiskin<mark>an ke dalam tiga klaster. Klast</mark>er I adalah program bantuan sosial berbasiskan rumah tangga. Termasuk di dalam Klaster I ini adalah Raskin, Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, dan Bantuan Siswa Miskin. Klaster II adalah kelompok program pemberdayaan masyarakat, dengan PNPM sebagai induk utama program yang akhirnya dijalankan oleh berbagai kementerian. Klaster III adalah pengembangan usaha mikro dan kecil dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai program utama pemerintah. Memasuki paruh kedua masa pemerintahannya, SBY melanjutkan tiga klaster program tersebut dan menambahkan beberapa program pro-rakyat lainnya yang dimasukkan ke dalam Klaster IV. Menghadapi situasi APBN yang amat dibebani oleh subsidi BBM, di tahun 2013 SBY kembali mengurangi subsidi BBM yang berujung kepada peningkatan harga BBM. Kompensasi kepada penduduk miskin dan rentan di berikan dalam satu rangkaian program yang salah satunya juga berisikan bantuan tunai yang disebut Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Keseluruhan usaha yang dilakukan oleh Pemerintahan SBY telah membuahkan hasil berupa pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil (di atas angka 6 persen per tahun), menurunnya rasio utang negara terhadap PDB, penurunan angka kemiskinan dan juga angka pengangguran. Namun demikian, terlihat peningkatan ketimpangan seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan Rasio Gini menjadi 0,41 di tahun 2011. Pembangunan ekonomi Indonesia menyisakan masalah pemerataan pendapatan, dan dalam kerangka yang lebih luas menyisakan masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



4 Penduduk Indonesia

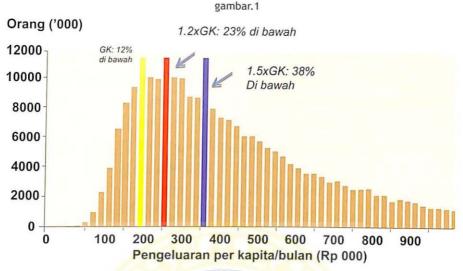
Para hadirin yang saya hormati,

Seperti telah diuraikan di awal, falsafah bangsa Indonesia mengamanatkan pembangunan untuk menciptakan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pembangunan adalah bagi rakyat, bagi penduduk Indonesia. Karena itu dalam upaya merumuskan bagaimana bauran kebijakan menciptakan kesejahteraan, sangat penting untuk mengetahui seperti apa karakteristik penduduk Indonesia tersebut. Saya akan melihat karakteristik Penduduk Indonesia menurut kelompok pendapatan, struktur demografis, dan juga dalam konteks geografisnya.

4.1. Penduduk menurut kelompok pendapatan

Menurut tingkat pengeluarannya, penduduk Indonesia dapat dikategorikan dalam empat kelompok:

- 1. **Kelompok miskin** yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah sekitar 29 juta jiwa,
- 2. **Kelompok rentan** sejumlah 70 juta jiwa yang pengeluarannya sudah di atas garis kemiskinan namun masih sangat rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan,
- 3. **Kelas menengah** sejumlah 100 juta jiwa yang terus berusaha tumbuh untuk bisa naik kelas, dan
- 4. **Kelompok kaya** sejumlah 50 juta jiwa yang merupakan *consuming class Indonesia*.



Gambar 1. Distribusi Pengeluaran Perkapita Indonesia, 2012 Sumber: SUSENAS 2011 diolah oleh TNP2K

Jika kita lihat distribusi pengeluaran masyarakat Indonesia (lihat Gambar 1), memang terlihat bahwa mereka yang hidupnya ada di sekitar garis kemiskinan jumlahnya sangat banyak. Di tahun 2012, terdapat sekitar 11,96% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Jika garis kemiskinan tersebut dinaikkan 20% (1.2 kali) saja, maka terdapat 23% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berarti, garis kemiskinan naik 20%, namun jumlah penduduknya hampir berlipat dua. Selanjutnya, jika garis kemiskinan tersebut dinaikkan sebesar 50% (1.5 kali), maka jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi 38%.

Tebalnya distribusi penduduk di sekitar garis kemiskinan ini menyebabkan pergerakan garis kemiskinan yang sedikit saja akan berdampak kepada jumlah orang yang terkategorikan miskin (yaitu yang hidup di bawah garis kemiskinan).

Karena itu perlu dengan seksama kita perhatikan komponen pengeluaran apa yang memiliki dampak serius kepada besarnya garis kemiskinan. Komponen-komponen ini dapat dibandingkan dengan proporsinya ketika membentuk Indeks Harga Konsumen (IHK).

Lihat Tabel 1. Secara mudah dapat dipahami bahwa proporsi pembentuk IHK adalah proporsi pengeluaran bagi rata-rata penduduk, sementara proporsi pembentuk garis kemiskinan adalah proporsi pengeluaran komoditas yang sama khusus di kelompok miskin (dan juga bagi sebagian kelompok rentan, karena perbedaan kelompok miskin dan rentan amat tipis).

tabel1. Proporsi komponen pengeluaran pembentuk Indeks Harga Konsumen dan Garis Kemiskinan

	Proporsi / Bobot (%)	
	Indeks Harga Konsumen	Garis Kemiskinan
Beras	5	29
Bahan makanan lain	15	28
Makanan jadi & rokok	17	8
Perumahan	26	17
Pakaian	7	4
Kesehatan	4	3
Pendidikan	7	4
Transportasi	19	7
Total	100	100

Sumber: SUSENAS diolah oleh TNP2K

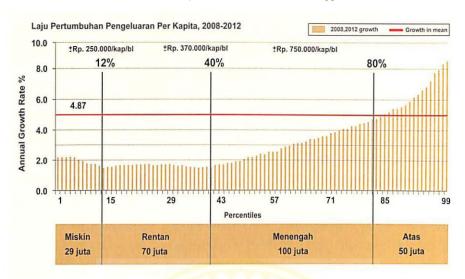
Konsumsi pangan memegang peranan penting dalam konsumsi masyarakat miskin. Lebih spesifik lagi, ternyata beras merupakan komponen utama garis kemiskinan. Sekitar 29% pengeluaran masyarakat miskin adalah untuk membeli beras. Karena itu jika harga beras mengalami kenaikan maka garis kemiskinan akan meningkat dengan cepat. Selanjutnya, dengan distribusi penduduk yang sangat 'tebal' di sekitar garis kemiskinan maka angka kemiskinan akan juga naik dengan cepat. Intensitas pembelian beras di kelompok miskin sangat jauh mencolok dibandingkan komposisi beras dalam pengeluaran rata-rata penduduk Indonesia (yang dicerminkan oleh indeks harga konsumen atau IHK). Dalam IHK, beras hanyalah sekitar 5% dari total pengeluaran. Maka stabilisasi harga beras menjadi faktor penting menangani masalah kemiskinan di Indonesia. Di sisi lain, pengeluaran masyarakat umum untuk transportasi mencapai 19%. Karena itulah maka peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM)

akan menjadi beban yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan, namun sesungguhnya dari sisi pengeluaran transportasi memang akan lebih berdampak kepada kelompok non-miskin.

Keempat kelompok penduduk di atas memiliki dinamika yang berbeda dalam 5 (lima) tahun terakhir, antara 2008-2012 (Lihat Gambar 2). Menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional, dapat ditunjukkan laju pertumbuhan pengeluaran riil per kapita dari keempat kelompok tersebut. Secara nasional, rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita di periode tersebut adalah sebesar 4,87% per tahun setelah mengeluarkan komponen inflasi.

Kelompok miskin, yaitu 12% penduduk dengan pengeluaran terendah, memiliki rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran di sekitar 2% per tahun. Kelompok yang paling miskin, yaitu kelompok sampai dengan 5-6%, memiliki laju pengeluaran sedikit di atas 2% sementara selebihnya memiliki laju pengeluaran di bawah 2% per tahun. Kelompok yang paling miskin memiliki laju pertumbuhan konsumsi yang sedikit lebih tinggi karena adanya program bantuan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), yang memang diarahkan kepada kelompok sangat miskin. Namun demikian, cakupan PKH ini relatif kecil. Pada tahun 2013 ini hanya akan mencapai 2,4 juta rumah tangga. Karena itulah maka kelompok termiskin ini memiliki sumber penghasilan dan pertumbuhan konsumsi yang sedikit di atas kelompok miskin lainnya yang tidak menerima PKH.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga



Gambar 2. Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012 Sumber: SUSENAS, diolah oleh TNP2K

Selanjutnya, kelompok rentan memiliki laju pengeluaran konsumsi di bawah 2% per tahun. Kelompok yang mencapai 70 juta jiwa ini, secara karakteristik pengeluaran perkapita, tidak berbeda dibandingkan dengan penduduk miskin. Kelompok kelas menengah sejumlah 100 juta jiwa memiliki laju pertumbuhan pengeluaran yang positif dengan status ekonominya. Semakin kaya kelompok kelas menengah ini maka semakin tinggi pula laju pertumbuhan pengeluarannya. Hal yang sama juga terlihat untuk kelompok kaya. Kelompok masyarakat di 20% terkaya memiliki laju pengeluaran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kelompok masyarakat yang paling kaya memiliki laju pertumbuhan pengeluaran per kapita mencapai 9% per tahun¹¹¹.

Dari uraian di atas kiranya dapat dipahami mengapa terjadi peningkatan Rasio Gini di Indonesia selama 4-5 tahun terakhir. Ketika pengeluaran konsumsi kelompok masyarakat miskin hanya meningkat 2% per tahun, sementara pengeluaran kelompok masyarakat kaya meningkat 9% per tahun, dan situasi ini berlangsung selama 4-5 tahun berturut-turut, maka dapat dipastikan bahwa Rasio Gini yang menunjukkan kesenjangan pengeluaran akan meningkat.

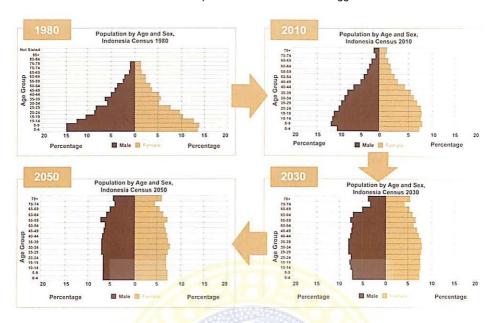
4.2. Penduduk menurut kondisi demografis

Para hadirin yang saya hormati,

Pembagian penduduk Indonesia menurut status demografisnya meliputi dimensi yang sangat luas. Saya akan menguraikan beberapa di antaranya: dimensi kesehatan yang terkait dengan siklus umur, produktivitas, kesetaraan *gender*, dan juga mobilitas.

Jika dilihat dalam perspektif jangka panjang, Indonesia telah dan akan terus mengalami transformasi struktur penduduk berdasarkan umur. Lihat Gambar 3. Pada tahun 1980, piramida penduduk Indonesia memang berbentuk segitiga, artinya struktur penduduk didominasi kelompok umur muda. Hal tersebut didorong oleh tingkat kelahiran yang masih tinggi, dan juga tingkat kematian yang relatif tinggi. Tiga puluh tahun kemudian di tahun 2010, piramida penduduk Indonesia memiliki bentuk yang sangat berbeda. Kelompok umur muda <mark>menun</mark>jukkan penurunan proporsi, <mark>semen</mark>tara kelompok umur tua m<mark>ulai t</mark>erlihat agak banyak. Penur<mark>unan t</mark>ingkat kelahiran yang 'dinikmati' Indonesia adalah hasil dari program Keluarga Berencana yang berjalan sejak awal tahun 1970an. Akumulasi penduduk lansia, di sisi lain, merupakan hasil dari perbaikan kondisi kesejahteraan, perbaikan teknologi kedokteraan dan perbaikan perawatan kesehatan. Proyeksi penduduk Indonesia menuju 2030 dan 2050 menunjukkan bahwa kelahiran masih akan tetap berlanjut, namun proporsi penduduk lansia akan menunjukkan peningkatan. Proses penuaan penduduk (population ageing) adalah proses yang tidak dapat dicegah.

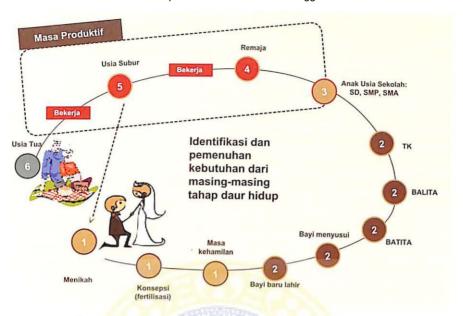
ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga



Gambar 3. Piramida penduduk Indonesia 1980 - 2050 Sumber: Tahun 1980 berdasarkan Sensus Penduduk 1980. Tahun 2010, 2030, 2050 dari Adioetomo (2004).

Peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia harus dipahami pula dalam konteks daur hidup individu (Gambar 4). Bayi yang dilahirkan sebagai penduduk Indonesia berasal dari dalam kandungan ibu. Karena itu kualitas perawatan bayi dalam kandungan memegang peranan sentral dalam menentukan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Anak balita Indonesia harus pula mendapatkan perawatan kesehatan dan nutrisi yang cukup. Ketika anak ini memasuki umur sekolah, maka merupakan kewajiban Negara untuk memastikan bahwa semua anak umur sekolah memang dapat mengenyam pendidikan, setinggi-tingginya. Di samping itu, perilaku hidup sehat seyogyanya diajarkan sejak dini.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga



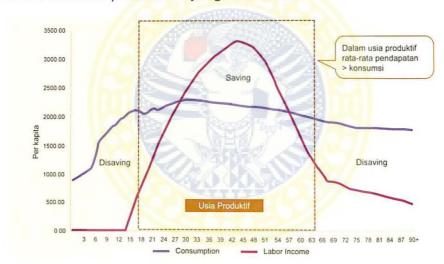
Gambar 4. Daur hidup (life cycle) individu menentukan kesejahteraan Sumber: Tim analisis

Ketika memasuki usia kerja, idealnya individu bekerja setelah mendapatkan pendidikan yang cukup. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tersedia pekerjaan yang cukup dan baik (decent) bagi seluruh penduduk yang bekerja. Regulasi pasar kerja memegang peranan sentral membangun hubungan industrial yang produktif. Pekerja Indonesia harus mendapatkan manfaat utama dari proses produksi, sehingga kesejahteraannya dapat meningkat bersama-sama dengan peningkatan kesejahteraan dunia usaha. Ketika individu memasuki usia lanjut, seorang individu akan menjadi lansia (lanjut usia) yang produktif apabila sehat dan berpendidikan. Persiapannya harus dimulai sejak umur dini, melalui kesehatan ibu dan janin, masa balita, akses pendidikan, akses pekerjaan dan produktivitas sampai dengan masa kerja, dan perlindungan sosial sepanjang hayat.

Berdasarkan umurnya, penduduk Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam:

 kelompok umur produktif, yaitu mereka yang masih menghasilkan pendapatan, dan kelompok umur non produktif, yaitu kelompok umur muda yang belum menghasilkan pendapatan dan kelompok lansia.

Gambar 5 menunjukkan kondisi pendapatan dan konsumsi menurut tingkat umur. Umur produktif, yaitu yang telah menghasilkan pendapatan, dimulai pada usia 15 tahuniv. Sebelum usia 15 tahun, kelompok penduduk non-produktif muda ini belum memiliki pendapatan, namun tentunya memiliki pengeluaran. Dalam periode ini individu melakukan dissaving. Mulai usia 15 tahun, individu mulai menghasilkan pendapatan. Kebijakan seyogyanya diarahkan agar pendapatan dapat meningkat secepat mungkin. Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa orang Indonesia mulai bekerja setelah memiliki pendidikan yang memadai.



Gambar 5. Perbandingan Konsumsi dan Penghasilan Menurut Umur Penduduk Indonesia, 2005
Sumber: Diolah oleh Net Transfer Account (NTA) Projects berdasarkan data SUSENAS dan APBN. Lihat Mason et al. (2009) untuk deskripsi NTA Projects.

Pendapatan masyarakat Indonesia secara makro menunjukkan titik puncaknya di sekitar umur 45 tahun. Setelah titik puncak ini maka pendapatan akan menurun. Kebijakan seyogyanya juga diarahkan agar titik puncak ini dibuat lebih panjang periode umurnya sehingga pendapatan masyarakat tidak terlalu cepat turun. Periode ketika

pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluaran adalah periode menabung (saving). Diharapkan bahwa periode menabung ini bisa lebih panjang sehingga tabungan secara makro juga bisa lebih besar.

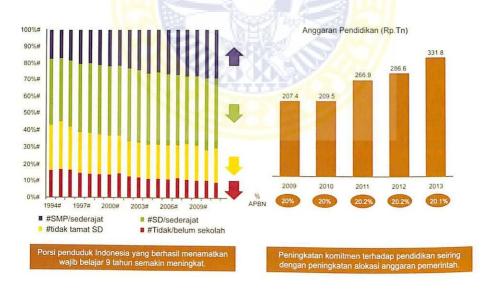
Memasuki usia pensiun, maka dapat dimengerti bahwa tingkat pendapatan akan terus turun. Namun konsumsi tidak bisa turun dengan kecepatan yang sama. Sebabnya adalah karena memasuki usia lanjut, seseorang membutuhkan biaya untuk perawatan kesehatan yang lebih besar. Di usia tua, individu akan sekali lagi mengalami periode dissaving. Secara makro, jika total saving lebih besar dari dissaving, maka perekonomian memiliki kesempatan untuk memberi warisan kepada generasi berikutnya atau menyumbangkan sebagian pendapatannya untuk bantuan internasional. Hal inilah yang dilakukan oleh negara-negara donor di dunia. Namun kebalikannya jika total saving ternyata lebih kecil dibandingkan dissaving maka perekonomian ini harus meminjam.

Jika kita lihat dalam perspektif waktu, saat ini Indonesia masih berada pada periode penurunan angka ketergantungan (dependency ratio). Dalam periode ini, Indonesia masih menikmati apa yang disebut sebagai bonus demografi (Adioetomo, 2006), yaitu berbagai penghematan dan potensi yang muncul dari kombinasi antara naiknya jumlah pekerja dan menurunnya jumlah anggota rumah tangga. Bonus demografi ini tercermin pada kenaikan tingkat tabungan dan investasi. Namun situasi ini tidak akan berlangsung selamanya, hanya akan bertahan selama sekitar satu dekade ke depan. Setelah itu, Indonesia akan mengalami peningkatan angka ketergantungan yang dipicu oleh penuaan penduduk (ageing population).

Menjadi penting untuk Indonesia untuk bisa terus meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, sambil pada saat yang sama menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh kelompok penduduk. Meningkatkan produktivitas tidak bisa dipandang hanya relevan bagi kelompok usia kerja. Investasi pada sumber

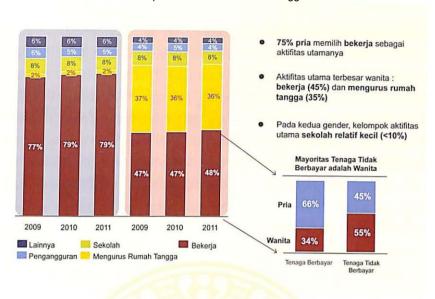
daya manusia sejak seseorang masih ada dalam kandungan adalah upaya peningkatan produktivitas di masa mendatang. Pengeluaran kesehatan, pendidikan, kebijakan pasar kerja, dan berbagai program perlindungan sosial adalah upaya untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki akses untuk maju secara berkeadilan.

Produktivitas tidak bisa dipisahkan dari upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jika dilihat dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mampu menurunkan persentase penduduk yang tidak atau belum bersekolah menjadi di bawah 10% (Gambar 6). Di samping itu, persentase penduduk yang memiliki pendidikan sedikitnya SLTP atau sederajat meningkat dari sekitar 18% di tahun 1994 menjadi sekitar 28% di tahun 2011. Pekerjaan rumah ke depan adalah memastikan bahwa anggaran pendidikan (yang ditetapkan sebesar 20% dari Anggaran) tidak saja dijalankan dengan target kuantitas, namun yang lebih penting adalah target kualitas.



Gambar 6. Persentase Penduduk Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Anggaran Pemerintah Untuk Pendidikan Sumber : BPS, Nota Keuangan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga



Gambar 7. Aktivitas Utama Menurut Gender Sumber : BPS

Terkait dengan dimensi pemberdayaan perempuan, profil perempuan dalam dunia kerja masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Lihat Gambar 7. Marginalisasi gender di pasar tenaga kerja ini tidak bisa lepas pula dari tingkat pendidikan perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, kecuali untuk pendidikan dasar. Namun demikian, tingkat pendidikan bukan merupakan satu-satunya penyebab. Angka partisipasi kerja perempuan yang lebih rendah juga sebagian disebabkan oleh peran perempuan mengurus rumah tangga. Bagi kelompok perempuan ini, saat mereka kembali ke pasar kerja biasanya berada dalam posisi tawar yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan umur yang sama.

4.3. Penduduk menurut geografi

Para hadirin yang saya hormati,

Aspek ketiga dari penduduk sebagai *platform* menciptakan kesejahteraan adalah pemahaman bahwa penduduk tersebar secara geografis. Sebaran penduduk dan kegiatan ekonomi Indonesia menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil selama empat dasawarsa terakhir. Alokasi dana pembangunan pun akhirnya tersebar sejalan dengan konsentrasi penduduk. Dalam jangka panjang, ketimpangan antardaerah menjadi masalah struktural (Nazara, 2010). Hubungan yang kompleks antara sebaran penduduk dan sebaran aktivitas ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kebijakan pembangunan wilayah dan penataan ruang Nasional (Susantono, 2009) yang seyogyanya mendorong pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Di luar Jawa, jumlah penduduk yang terbatas mengakibatkan terbatasnya pula sumber daya produksi dan terbatasnya pasar. Lebih dari itu, daerah dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi mengalami tantangan atas daya dukung lingkungan vi.

Sebagai negara yang luas dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki dinamika gerak demografis yang juga luar biasa. Meskipun selama empat dasawarsa sebaran penduduk dan kegiatan ekonomi relatif stabil, namun dengan semakin tingginya tingkat pendapatan, mobilitas penduduk antarwilayah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pergerakan penduduk adalah upaya individu memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Negara seharusnya memfasilitasi pergerakan penduduk yang efisien sehingga dapat memberi manfaat maksimal bagi perbaikan kesejahteraan tersebut.

Dimensi lain dari sebaran penduduk dan aktivitas ekonomi adalah antara desa dan kota. Indonesia mengalami urbanisasi yang sangat cepat, dan kehidupan makin mengkota. Urbanisasi memang menawarkan efisiensi yang dapat dieksploitasi oleh Indonesia menuju negara maju. Namun filosofi yang lebih utama ialah bahwa kota dan desa adalah komplemen. Karena itu pembangunan daerah perdesaan adalah mutlak. Satu isu penting adalah aksesibilitas pedesaan, dimana diperlukan konektivitas yang baik untuk menghubungkan desa dengan wilayah sekitarnya, menjamin kemudahan masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas sosial ekonomi, dan fasilitas publik, dengan mudah.

Berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia adalah negara kepu-

lauan terbesar di dunia. Sehingga sepantasnya Indonesia membutuh-kan sebuah konsep pembangunan tersendiri. Pendekatan dilakukan dengan realisasi bahwa dalam konteks negara kepulauan, daratan dan lautan merupakan ruang aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Inilah hakikat konsep Archipelago Economy atau ekonomi berbasis kepulauan. Konsep tersebut memiliki tiga pilar utama, yaitu konektivitas, infrastruktur fisik dam Social Geography.

Di negara kepulauan seperti Indonesia, konektivitas adalah satu pendukung utama aktivitas perekonomian. Terintegrasinya sistem transportasi akan mendukung konektivitas. Sistem tansportasi yang teritegrasi akan meningkatkan efisiensi karena transportasi adalah salah satu input dalam proses produksi (Batten dan Boyce, 1986). Konektivitas menjadi penting dikarenakan Indonesia adalah megara yang luas, berbasiskan kepulauan, memiliki kontur alam beragam dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar sehingga dibutuhkan sistem penunjang interaksi antarwilayah yang terintegrasi sebagai instrumen pendorong kegiatan perekonomian. Konsep konektivitas di Indonesia diwujudkan dalam integrasi tiga sistem, yaitu:

- Sistem logistik nasional sebagai pendukung perpindahan barang/jasa,
- Sistem transportasi sebagai pendukung perpindahan manusia, dan
- Information and Communication Technology sebagai
 pendukung perpindahan data dan informasi.

Namun dalam implementasi Ekonomi Kepulauam, tantangannya tiidak kecil. Dengan jumlah pulau sebanyak 17.504, garis pantasi sepanjang 54.716 kilometer serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar, dituntut adanya keterpaduan antanmoda transportasi baik untuk angkutan orang maupun barang, peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke daerah sekitar maupun antarpusat pertumbuhan serta peningkatan pemerataan pemba-

ngunan baik untuk daerah tertinggal maupun perbatasan.

Tantangan lainnya terkait dengan konektivitas adalah dari segi *Information and Communication Technology (ICT)*, masih tingginya ketimpangan pada infrastruktur telematika tersebut. Tingkat penetrasi komputer dan internet pada masing-masing wilayah di Indonesia misalnya, menunjukkan ketimpangan yang relatif besar^{vii}. Karena itu diperlukan pendekatan khusus untuk meningkatkan penetrasi telematika per rumah tangga guna mendukung pemerataan pembangunan.

Konektivitas membutuhkan pembangunan fisik infrastruktur. Tidak ada perdebatan lagi bahwa pembangunan infrastruktur memberi dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan (Suleman & Iqbal, 2012). Kita pahami bahwa pembiayaan infrastruktur tidak harus sepenuhnya berasal dari Pemerintah. Berbagai skema kemitraan publik dan swasta telah dirumuskan dan dijalankan di berbagai negara. Tentu Indonesia dapat mengambil pelajaran. Saya sendiri berpendapat bahwa infrastruktur dasar pun dapat dibangun menggunakan sepenuhnya dana dunia usaha (bahkan swasta). Syaratnya adalah bahwa pembangunan infrastruktur memang menjadi solusi dan keputusan bisnis. Karena itu diperlukan dukungan pemerintah dalam bentuk tata regulasi yang sensitif terhadap kebutuhan dunia usaha. Alokasi pembiayaan infrastruktur oleh Pemerintah dapat fokus pada jenis-jenis infrastruktur yang memang tidak diminati oleh dunia usaha dan swasta.

5 | Agen Pertumbuhan dan Transformasi Ekonomi

Para hadirin yang saya hormati,

Telah saya uraikan di atas esensi dari penduduk sebagai platform dari transformasi Indonesia menjadi negara maju. Pertanyaan yang berikutnya adalah, dari mana atau siapa yang menciptakan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi tersebut. Dalam jargon Ilmu Ekonomi, pertanyaan tersebut biasanya berbunyi: 'Siapa yang menciptakan nilai tambah di perekonomian?'

Kita semua telah mengetahui bahwa nilai tambah diciptakan oleh empat kelompok pelaku ekonomi, yaitu (i) rumah tangga, (ii) produsen/dunia usaha, (iii) pemerintah, (iv) luar negeri. Dari keempat kelompok tersebut, siapakah yang harus berperan dalam menciptakan Indonesia yang sejahtera?

Mungkin selama ini kita memiliki anggapan yang mengatakan bahwa arah ekonomi kita semata-mata hanya ditentukan oleh kebijakan dan belanja pemerintah. Namun, sebenarnya kita tidak dapat menyerahkan tugas menciptakan nilai tambah di perekonomian kepada pemerintah saja. Hal ini disebabkan oleh kemampuan belanja pemerintah yang relatif terbatas. Sebagai gambaran, pada tahun 2012 lalu belanja pemerintah hanya memberi kontribusi sebesar sekitar 9 persen terhadap PDB kita. Jadi dapat dikatakan bahwa unsur-unsur diluar pemerintahlah yang justru memberikan daya dukung lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Artinya, untuk mengoptimalkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi, kita harus memberikan kesempatan kepada sektor di luar pemerintah (dunia usaha maupun masyarakat) untuk dapat berkembang secara maksimal. PIDATO GURU BESARMENUJU INDONESIA MAJU... CHAIRUL TANJUNG

Saya tidak mengatakan bahwa peran pemerintah menjadi tidak penting untuk menciptakan kesejahteraan di masa mendatang. Akan tetapi, fokus program pembangunan pemerintah tidak hanya dalam hal pengelolaan pemerintahan, tetapi juga menjadi agen penciptaan kondisi iklim investasi dan berbisnis yang baik, yang memberi peluang kepada dunia usaha untuk bertumbuh secara maksimal. Termasuk di dalamnya, antara lain, menyediakan infrastruktur, memudahkan prosedur dan administrasi untuk berusaha, dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja dengan memperbanyak program-program pendidikan yang diperlukan oleh dunia usaha.

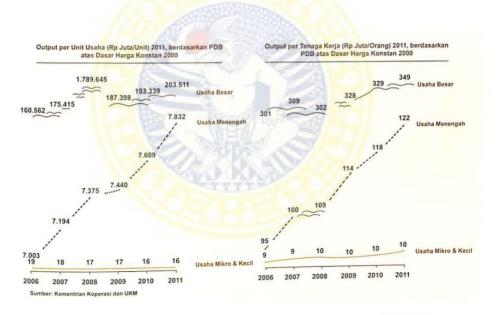
Selanjutnya, dilihat dari ukurannya, dunia usaha Indonesia dapat dibagi menjadi usaha skala besar dan skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha skala besar dijalankan oleh pelaku usaha yang sudah memiliki pengetahuan produksi, manajemen, maupun pemasaran yang canggih. Untuk usaha pada skala ini pemerintah tidak perlu terlalu banyak campur tangan untuk meningkatkan kinerja mereka. Mereka hanya perlu dukungan iklim berinvestasi dan iklim berusaha yang baik, termasuk di dalamnya dukungan infrastruktur yang memadai dan sistem perijinan yang tidak berbelit-belit. Pada dasarnya pemerintah hanya perlu menyediakan kondisi dimana pelaku usaha skala besar Indonesia dapat terus bertumbuh, dan pada akhirnya menjadi pemain utama di kancah dunia.

Sedangkan UMKM memerlukan perlakuan yang berbeda. Pelaku usaha yang termasuk dalam golongan UMKM masih memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah untuk dapat terus berkembang, dan dapat naik kelas. Usaha mikro dan kecil harus didukung agar secara berangsur-angsur menjadi usaha menengah. Pada saat yang bersamaan, usaha menengah harus terus diberi peluang yang lebih besar agar dapat tumbuh menjadi usaha dengan skala besar.

Saat ini sekitar 99% dari unit usaha di Indonesia tergolong UKM, yang menyerap 97% dari keseluruhan pekerja Indonesia, dan memberi kontribusi sebesar 57,6% terhadap PDB. Mengingat dampak

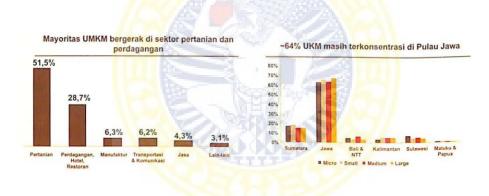
yang besar dari UKM terhadap kehidupan masyarakat kita tersebut, pemberdayaan dan peningkatan kinerja UKM merupakan salah satu langkah yang amat penting dan jitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Namun, untuk dapat membuat kebijakan yang mendukung perkembangan UKM, kita perlu memahami tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh UKM kita. Tantangan yang pertama adalah masalah produktivitas. Walaupun memiliki peran yang signifikan dalam penyediaan lapangan kerja dan dalam menciptakan pendapatan, UKM kita tidak didukung oleh produktivitas yang memadai (Gambar 8). Hal ini, antara lain, terlihat dari output/unit maupun output/tenaga kerja dari UKM yang jauh lebih kecil dari usaha skala besar.



Gambar 8. Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, 2006-2011 Sumber : Kementrian Koperasi dan UKM

Tantangan kedua adalah kenyataan bahwa mayoritas UMKM kita didominasi oleh usaha informal. Gambar 9 menunjukkan bahwa mayoritas usaha mikro, kecil dan menengah bergerak di sektor pertanian (51,5%) dan perdagangan, hotel dan restoran (28,7%). Keduanya meliputi hampir 80% dari total usaha mikro, kecil, dan menengah. Karakteristik usaha di kedua sektor tersebut, sayangnya masih sangat didominasi oleh usaha informal. Usaha informal memiliki asosiasi yang erat dengan ketidakpastian usaha, jam usaha yang tidak teratur, perlindungan usaha dan pekerja yang tidak memadai, dan juga ketaatan kepada peraturan yang lemah. Kita harus dapat melakukan transformasi UMKM dengan serius agar mereka dapat berkembang menjadi usaha yang bersifat formal, sehingga dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih signifikan.



Gambar 9. Bidang Usaha dan Lokasi UMKM sumber: SUSENAS 2009

Tantangan utama lainnya yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah masalah akses terhadap permodalan. Sekitar 43% dari UMKM memakai modal sendiri (yaitu sumber modal pribadi dan keluarga). Hanya sekitar 25,5% yang mendapatkan permodalan dari perbankan.

Para hadirin yang saya hormati,

Selain memperhatikan masalah pada level perusahaan, kita juga perlu mencermati perkembangan yang terjadi pada perekonomian kita secara sektoral. Pengalaman dari negara-negara maju menunjukkan bahwa untuk bertransformasi menjadi negara maju diperlukan pergeseran mesin pertumbuhan ekonomi. Suatu negara menjadi maju biasanya setelah mengalami transformasi dari negara yang mengandalkan pertumbuhannya dari sektor pertanian, menjadi negara yang mengandalkan pertumbuhannya pada sektor manufaktur, dan atau menjadi negara yang mengandalkan mesin pertumbuhannya pada sektor jasa.

Indonesia sebenarnya sudah menjalani proses transformasi tersebut. Lihat Tabel 2. Pada tahun 1970 sektor pertanian memberi kontribusi sebesar 47,4 persen terhadap PDB, sedangkan sektor Manufaktur sebesar 9,0 persen. Program pembangunan ekonomi yang telah kita jalankan telah merubah struktur ekonomi kita secara signifikan. Pada tahun 1995, kontribusi sektor Pertanian sudah turun menjadi 17,1 persen, sedangkan sektor Manufaktur naik menjadi 24,1 persen. Namun, sejak krisis 97/98 proses transformasi tersebut tampak terhenti. Hingga semester pertama 2013 tidak ada perubahan yang signifikan terhadap pangsa kontribusi sektoral terhadap perekonomian. Misalnya, kontribusi sektor Manufaktur terhadap PDB kita pada tahun 2013 masih berada di sekitar 23,7 persen, tidak jauh berbeda dari angka pada tahun 1995.

Tabel 2. Kontribusi Sektoral Terhadap PDB Indonesia (persen).

Menurut Sektor	1970	1993	1995	2005	2010	2011	2012	2013 1st H
	47.4	17.9	17.1	13.1	15.3	14.7	14.4	15.0
Pertanian	5.6	9.6	8.8	11.1	11.2	11.8	11.8	10.9
Pertambangan	9.0	22.3	24.1	27.4	24.8	24.3	23.9	23.7
ndustri Pengolahan	0.5	1.0	1.2	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8
Listrik, Gas & Air Bersih	2.7	6.8	7.6	7.0	10.3	10.2	10.4	10.2
Konstruksi	17.6	16.8	16.6	15.6	13.7	13.8	13.9	14.3
Perdagangan, Hotel & Rest.	3.0	7.0	6.8	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8
Pengangkutan dan Komunikasi	1.5	8.5	8.7	8.3	7.2	7.2	7.3	7.6
Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa	12.7	10.1	9.0	10.0	10.2	10.6	10.8	10.6

Sumber: BPS (diolah)

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Tabel 3. Pangsa Penyerapan Tenaga Keja Menurut Sektor (Persen).

Menurut Sektor	1995	2005	2010	2011	2012	2013 1st H
Pertanian	44.0	44.0	38.3	35.9	35.1	35.0
Pertambangan	0.8	1.0	1.2	1.3	1.4	1.4
Industri Pengolahan	12.6	12.7	12.8	13.3	13.9	13.0
Listrik, Gas & Air Bersih	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Konstruksi	4.7	4.9	5.2	5.8	6.1	6.0
Perdagangan, Hotel & Rest.	17.3	19.1	20.8	21.3	20.9	21.8
Pengangkutan dan Komunikasi	4.3	6.0	5.2	4.6	4.5	4.6
Keuangan, Real Estat	0.8	1.2	1.6	2.4	2.4	2.6
Jasa, Sosial dan Perorangan	15.1	11.0	14.7	15.2	15.4	15.4

Sumber: BPS (diolah)

Terhambatnya proses transformasi sektoral tersebut juga berdampak pada relatif stagnannya perubahan kontribusi sektoral terhadap penciptaan lapangan kerja (Tabel 3). Hal ini, antara lain, terlihat dari pangsa tenaga kerja yang bekerja di sektor Manufaktur yang masih tercatat sebesar 13,0 % di tahun 2013, sedikit turun naik dari 12,6% di tahun 1995.

Untuk bertransformasi menjadi negara maju kita harus melanjutkan proses transformasi yang terhambat tersebut. Program pembangunan harus kembali diarahkan untuk kembali meningkatkan pertumbuhan sektor Manufaktur dan sektor Jasa. Namun, kita juga harus menyadari bahwa proses tersebut memerlukan waktu, sehingga kita tidak boleh mengabaikan sektor pertanian.

6 | Permasalahan Sektor Pertanian dan Perikanan

Para hadirin yang saya hormati,

Secara khusus saya ingin membahas beberapa masalah utama yang ada di Sektor Pertanian dan Perikanan di Indonesia, karena sektor ini memiliki peranan besar dalam peningkatan kesejahteraan Indonesia, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan. Dengan memahami masalah yang ada di sektor Pertanian, maka kita akan dapat memformulasikan kebijakan yang memberi dampak lebih optimal terhadap kemajuan sektor ini.

Masalah pertama di sektor pertanian kita adalah ketimpangan penguasaan lahan pertanian yang semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh Rasio Gini kepemilikan lahan pertanian (lihat Tabel 4). Pada tahun 1973, Rasio Gini kepemilikan lahan pertanian tercatat 0,548. Namun angka tersebut kemudian meningkat tajam menjadi 0,717 pada tahun 2003. Ketimpangan kepemilikan lahan terbesar terjadi di pulau Jawa yakni dengan Rasio Gini 0,723 di tahun 2003, sementara di luar pulau Jawa sebesar 0,582 pada tahun yang sama.

Tabel 4. Rasio Gini dari distribusi kepemilikan lahan pertanian (total lahan irigasi dan lahan kering)

Tahun	Jawa	Luar Jawa	Indonesia
1973 _{a,d)}	0.4479	-	0.5481
1983a,d)	0.4901	0.4786	0.5047
1993b,d)	0.5588	0.4774	0.6432
2003c,d)	0.7227	0.5816	0.7171

Sumber:

- Sensus Pertanian 1973 dan 1983 (Santoso, 1985 dalam Sayogyo, 1988),
 Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- b) Sensus Pertanian 1993, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- c) Sensus Pertanian 2003, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- d) Rusastra, I.W. dkk. Land and Household Economy: Analysis of Agricultural Census 1983-2003 (PSE-Kementrian Pertanian)

Masalah yang kedua berkaitan dengan marginalisasi, yang dicirikan oleh semakin menyempitnya penguasaan lahan oleh para petani, yang berimplikasi pada penurunan pendapatan petani. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian Indonesia mengalami penurunan dari 0,99 ha tahun 1983 menjadi 0,79 ha tahun 2003.

Tabel 5. Persentase dari rumah tangga petani tanaman pangan berdasarkan jumlah dan ratarata kepemilikan lahan di Indonesia, 1983-2003

			Persentase	Rumah Ta	ngga dan Ke	pemilikan			
Kategori Luas 1983		1993			2003				
Lahan	Jumlah HH	Luas Lahan	Rata-rata Kepemilikan	Jumlah HH	Luas Lahan	Rata-rata Kepemilikan	Jumlah HH	Luas Lahan	Rata-rata Kepemilika
< 0.10	1.245.960 7.30	63.722 0.38	0.05	1.594.375 7.54	82.979 0.49	0.005	4.269.044 17.17	96.255 0.49	0.02
0.10 - 0.49	6.355.004 37.21	1.703.678	0.27	7.986.510 37.75	747.406 4.46	0.09	9.795.545 39.24	876.587 4.46	0.09
0.50 - 0.99	4.000.264	2.655.352	0.66	4.373.203	3.906.272 23.29	0.89	4.578.053	4.581.431	1.00
1.00 - 1.99	3.179.270	4.087.770	1.29	4.442.493	4.253.652 25.36	0.96	3.460.406	23.29 4.988.852	1.44
> 2.00	2.298.818	8.331.726 49.47	3.62	2.779.390		2.80	13.91 2.801.627 11.27	25.36 9.130.287 46.41	3.26
Total	17.079.316 100.00	16.842.248 100.00	0.99		16.774.170	0.79	24.868.675	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	0.79

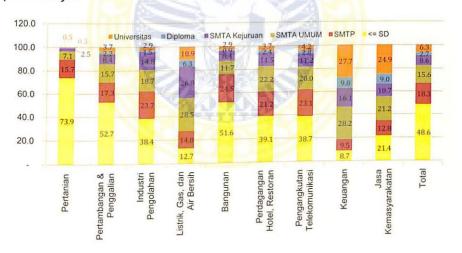
Sumber:

- 1) Sensus Pertanian 1983, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- 2) Series B1 Sensus Pertanian 1993, Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Rusastra, I.W. dkk. Land and Household Economy: Analysis of Agricultural Census 1983-2003 (PSE-Kementerian Pertanian).

Masalah yang ketiga adalah konversi lahan pertanian ke non-pertanian yang sangat tinggi. Konversi atau alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian dalam dekade 1983-1993 mencapai 1,28 juta ha atau rata-rata 128 ribu ha per tahun. Pada dekade selanjutnya PIDATO GURU BESAR MENUJU INDONESIA MAJO....

yaitu 1993-2003, angka konversi tersebut sedikit menurun menjadi 1,26 juta ha atau rata-rata 126 ribu ha per tahun. Akibatnya, lahan pertanian kita menurun dari 16,7 juta ha di tahun 1983 menjadi 14,1 juta ha di tahun 2003.

Selain itu, sektor Pertanian (dalam arti luas) Indonesia juga menghadapi masalah lambannya pembangunan infrastruktur pertanian. Secara khusus adalah infrastruktur irigasi, dimana persentase lahan beririgasi teknis terhadap luas lahan yang ditanami dalam enam tahun terakhir menurun dari sekitar 32 persen menjadi sekitar 28 persen. Menurunnya infrastruktur irigasi membuat ketersediaan air irigasi untuk budidaya padi dan tanaman pangan lainnya menjadi berkurang, terutama pada musim kemarau. Sedangkan di musim penghujan, air hujan langsung mengalir ke sungai mengakibatkan banjir dan mempercepat pendangkalan waduk, bendungan, situ, serta jaringan irigasi. Akibatnya, luas tanam dan luas panen menjadi lebih kecil dari potensinya.



Gambar 10. Struktur Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Sektoral, dari 110,8 juta penduduk bekerja (persen). Sumber: BPS (Agustus 2012)

Sektor Pertanian kita juga menghadapi masalah rendahnya sumber daya manusia. Hal ini membatasi kemampuan petani dan nelayan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang tersedia secara optimal. Lihat Gambar 10. Rendahnya kualitas SDM petani dan nelayan PIDATO GURU BESARMENUJU INDONESIA MAJU... CHAIRUL TANJUNG

Indonesia terlihat dari fakta bahwa hampir 74% dari total petani/ nelayan kita berpendidikan SD atau lebih rendah.

Dampak dari rendahnya kualitas SDM tersebut adalah rendahnya produktivitas di sektor Pertanian. Lihat Tabel 6. Dibandingkan dengan sektor lain, sektor Pertanian memiliki produktivitas yang paling rendah. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja di sektor pertanian/perikanan.

Tabel 6. Produktivitas berbagai sektor perekonomian (2010-2012)

Produktivitas (PDB Nominal / Tenaga Kerja) (Juta Rp)						
	2010	2011	2012			
Pertanian	23.7	27.8	30.6			
Pertambangan dan Penggalian	553.4	586.4	606.8			
Industri Pengolahan	115.4	124.5	128.1			
Listrik, Gas & Air Bersih	256.9	285.8	325.6			
Bangunan	118.1	119.7	126.7			
Perdagangan, Hotel & Restoran	39.1	43.8	49.4			
Pengangkutan, Telekomu <mark>nikasi</mark>	74.6	96.4	109.8			
Keuangan	272.0	205.8	221.6			
Jasa Kemasyarakatan	40.9	47.2	52.0			
Total	59.4	67.7	74.4			

Sumber: Biro Pusat Statistik (diolah).

7 | Bauran Kebijakan

Para hadirin yang saya hormati,

Telah saya uraikan di atas esensi dari penduduk dan dunia usaha sebagai platform dari transformasi menciptakan Indonesia Maju, Berkeadilan dan Sejahtera untuk Semua. Indonesia membutuhkan seperangkat kebijakan untuk mewujudkan itu. Saya yakini bahwa bentuknya bukan sekedar kumpulan dari sejumlah kebijakan sektoral. Tetapi seharusnya adalah satu bauran kebijakan yang memiliki benang merah menciptakan kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan.

Indonesia harus terus tumbuh

Pertumbuhan adalah kunci menciptakan kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, maka tidak mungkin ada pemerataan kesejahteraan. Meningkatkan kesejahteraan adalah meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup penduduk Indonesia. Terkait dengan pendapatan, kelompok miskin dan rentan harus meningkat pendapatannya dan menjadi kelas menengah. Kelas menengah harus tumbuh pula pendapatannya sehingga bergabung dengan kelompok kaya. Sementara itu, kelompok kaya juga harus menjadi lebih banyak jumlahnya dan terus tumbuh pendapatannya menjadi lebih tinggi lagi.

Karena kemajuan dan pertumbuhan diciptakan oleh dunia usaha, maka seluruh kelompok usaha harus pula membesar dan mengalami pertumbuhan. Kelompok usaha mikro dan kecil harus tumbuh, bergabung dengan kelompok usaha menengah. Selanjutnya, kelompok usaha menengah harus juga tumbuh menjadi kelompok usaha besar. Kelompok usaha besar harus juga meningkat dan sebanyak mungkin

menjadi pemain tingkat dunia (global player). Pertumbuhan ini harus terjadi dalam berbagai dimensi, utamanya produktivitas.

Penduduk yang makin tinggi pendapatannya dan dunia usaha yang makin berkembang adalah sumber dari penerimaan negara.

Pertumbuhan memerlukan perbaikan iklim usaha.

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (melalui peningkatan nilai tambah) diciptakan oleh dunia usaha. Karena itu perekonomian harus menyediakan ruang yang cukup bagi dunia usaha untuk tumbuh. Indonesia tidak boleh berpretensi bahwa investasi langsung akan terus masuk seperti sebelumnya. Pemerintah seyogyanya terus memperbaiki iklim dunia usaha dengan terus melakukan perbaikan pengurusan izin investasi di lapangan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Selain itu, P<mark>emerin</mark>tah perlu secara kompreh<mark>ensif m</mark>emperbaiki kualitas regulasi agar lebih sensitif kepada kebutuhan dunia usaha. Regulasi yang berlebihan harus dihindari. Di samping itu, Pemerintah juga perlu memperbaiki kepastian hukum dan regulasi.

Selanjutnya, iklim usaha akan membaik dengan pembangunan infrastruktur. Pembiayaan infrastruktur tidak harus keseluruhannya mengandalkan anggaran Pemerintah. Selain alternatif pembiayaan menggunakan skema kemitraan pemerintah dan swasta, pembangunan infrastruktur juga dapat dibiayai oleh dunia usaha. Syaratnya ialah bahwa pembangunan infrastruktur memang harus menjadi solusi bisnis. Dengan demikian, anggaran Pemerintah dapat sepenuhnya dipakai untuk membangun infrastruktur yang bersifat *pioneer*, di mana dunia usaha benar-benar tidak dapat berpartisipasi.

Sektor Pertanian dan Kawasan Perdesaan perlu mengalami transformasi mendorong produktivitas.

Menciptakan Indonesia Maju, Berkeadilan dan Sejahtera untuk Semua menuntut dilakukannya transformasi perekonomian. Satu inti transformasi ekonomi Indonesia adalah transformasi di sektor pertanian dan perikanan, yang juga harus terkait erat dengan perkembangan manufaktur dan sektor lainnya. Transformasi tersebut dijalankan melalui tiga cara sebagai berikut:

- Mobilisasi tenaga kerja pertanian ke non-pertanian dan non-perikanan. Untuk itu perlu ada pembangunan agro-industrialisasi di pedesaan. Pembangunan ini seyogyanya tidak hanya bertumpu kepada pembiayaan Pemerintah, namun juga memberi ruang sebesar-besarnya pada partisipasi dunia usaha.
- 2. Peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan (capacity building) untuk meningkatkan kesempatan kerja masyarakat pada sektor agroindustri maupun pada sektor non-pertanian. Salah satu cara adalah melalui pelatihan dan pendidikan formal maupun informal. Penciptaan wirausaha perdesaan juga sangat penting. Wirausaha pedesaan difokuskan untuk mengembangkan produk pertanian/perikanan olahan yang menjadi bagian dari mata rantai sistem agroindustri.
- 3. Pembangunan dengan konsep Agropolitan, yaitu upaya pengembangan wilayah pedesaan dengan agribisnis sebagai aktivitas utamanya. Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota. Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perde-

saan. Ini berarti akan menahan perpindahan penduduk desa ke kota. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah diubah menjadi bentuk campuran yang dinamakan agropolis atau kota di ladang. Untuk mendukung konsep Agropolitan ini maka diperlukan setidaknya dua faktor utama yaitu: 1) Teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan budidaya perikanan dan 2) Infrastruktur (transportasi, irigasi, air bersih, listrik, ICT) dan fasilitas sosial-ekonomi pedesaan yang memadai.

Industri Manufaktur harus mampu memenuhi kebutuhan domestik yang terus meningkat

Kebijakan industri harus merupakan satu kesatuan dengan transformasi sektor pertanian (dalam arti luas). Industri sebaiknya dimulai dari sumber daya yang berlimpah atau memiliki comparative advantage di negara tersebut. Kebijakan industri berperan untuk melakukan transformasi comparative advantage menjadi competitive advantage. Indonesia memiliki kelimpahan sumber daya alam, khususnya pertanian, tambang/energi, serta industri kreatif yang menunjang perekonomian Indonesia di masa depan yang berbasiskan teknologi komunikasi dan informasi.

Dengan peningkatan kesejahteraan, Indonesia akan terus mengalami peningkatan dan perubahan komposisi permintaan, termasuk peningkatan dan perubahan komposisi produk pangan. Sedapat mungkin produsen domestik harus dapat memenuhi peningkatan permintaan tersebut. Adapun jenis produk agro-industri pangan yang dibutuhkan ialah yang memang sedang atau diperkirakan akan banyak mengalami kenaikan permintaan. Oleh sebab itu, akan sangat relevan untuk mempertimbangkan produk-produk yang sedang dan akan dibutuhkan oleh kelas menengah Indonesia yang sedang dan akan bertumbuh, sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung. Satu hal yang jelas ialah produk-produk tersebut

hendaklah yang lebih berkualitas, lebih memperhatikan aspek kesehatan, serta menjawab tuntutan-tuntutan *life style* sesuai dengan tingkat pendapatan.

Indonesia juga harus menciptakan struktur industri manufaktur yang tepat. Untuk mendukung industri yang dapat memenuhi kebutuhan domestik, maka struktur industri Indonesia harus memiliki industri hulu yang kuat, termasuk industri petrokimia dan industri baja. Kehadiran industri hulu yang kuat akan mendorong industri bahan barang mentah, industri bahan baku, dan juga selanjutnya industri barang jadi. Dengan struktur industri yang kuat maka peningkatan permintaan domestik tidak harus disertai dengan peningkatan impor yang lebih besar.

Pembangunan (Transformasi) Sosial memberi kesempatan bagi semua untuk tumbuh dan sejahtera bersama.

Seperti telah disampaikan sebelumnya, setiap kelompok penduduk harus tumbuh. Yang pertama adalah kelompok atas/kaya. Kelompok ini pada hakekatnya telah memiliki kecukupan akses terhadap pembangunan, dan karenanya mampu mengurus dirinya sendiri. Kelompok kaya akan menjadi lebih besar dengan sendirinya. Bantuan yang mereka harapkan dari Pemerintah adalah perbaikan iklim usaha serta jaminan atas regulasi dan penegakan hukum.

Selanjutnya adalah kelompok kelas menengah. Transformasi kelompok kelas menengah untuk tumbuh besar memerlukan perhatian berbeda. Kelompok kelas menengah membutuhkan barang dan jasa yang terjangkau dengan kemampuannya. Untuk itu, sesungguhnya kelas menengah juga membutuhkan iklim usaha yang baik. Keberadaan pasar yang efisien dan regulasi (kepastian hukum) yang baik memiliki dampak yang positif bagi kelas menengah karena sebagai kelas pekerja, kelompok ini memerlukan dunia usaha yang berkembang terus. Kelas menengah perlu terus mendapatkan insentif untuk tumbuh lebih besar lagi. Karena itu, Kelas Menengah juga

perlu mendapatkan peluang-peluang tambahan, termasuk melalui kebijakan AFFIRMATIVE ACTIONS yang tetap berbasiskan KOMPETISI.

Namun demikian, Kelas Menengah memiliki EKSPEKTASI mengenai apa yang seharusnya mereka dapatkan dari perekonomian yang terus maju. Hal ini tidak lepas dari pendidikan yang lebih baik dan kemudian pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ekspektasi ini dapat dilihat dalam spektrum yang sangat luas. Kelas Menengah memerlukan adanya layanan kesehatan yang memadai, juga layanan pendidikan bagi anak-anaknya. Kelas Menengah di daerah perkotaan membutuhkan perumahan, transportasi publik, dan berbagai layanan pemerintah lainnya. Meskipun kelas menengah terus mendapatkan perbaikan kesejahteraan namun mereka tidak dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri dan keluarganya dari seluruh resiko sosial. Kelas menengah memerlukan perlindungan sosial.

Selanjutnya adalah kelompok miskin dan rentan, yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Kelompok miskin ada di bawah garis kemiskinan. Kelompok Rentan ada di atas garis kemiskinan namun masih sangat rentan jatuh menjadi miskin.

Yang dibutuhkan oleh Kelompok Rentan dan Miskin adalah AKSES kepada hasil-hasil Pembangunan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana Negara dapat MENJAMIN AKSES tersebut. Filosofi bauran kebijakan ini, akses tersebut dapat disediakan oleh negara melalui empat hal:

Program bantuan (transfer) tunai
 Rumah tangga miskin dan rentan membutuhkan sejumlah uang tunai sebagai dasar dari transformasi menciptakan kesejahteraan. Ketidakcukupan pendapatan menyebabkan keluarga kelompok miskin dan rentan tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi, menyekolahkan anak, menjaga kesehatan, sehingga

akhirnya tidak memiliki produktivitas yang cukup untuk bisa keluar dari kemiskinan^{viii}.

Bantuan tunai idealnya diberikan secara bersyarat. Artinya, bantuan tunai dihubungkan dengan seperangkat tanggung jawab yang harus dipenuhi rumah tangga. Tanggung jawab ini biasanya terkait dengan upaya pendidikan dan kesehatan, misalnya kehadiran anak di sekolah, imunisasi, menghadiri kegiatan penyuluhan kesehatan, dsb.

2. Program pendampingan

Rumah tangga miskin dan rentan memerlukan pendampingan agar dapat mengakses hasil pembangunan. Pemerintah bisa saja membangun sekolah, fasiltas kesehatan, layanan publik, dsb. Namun itu saja tidak cukup, karena tidak otomatis keluarga miskin akan membawa anak-anaknya untuk bersekolah atau memeriksakan kesehatan keluarganya. Diperlukan Pendampingan untuk rumah tangga miskin dan rentan mengakses seluruh dimensi tersebut. Pendampingan memastikan bahwa rumah tangga miskin dan rentan memperoleh akses ke fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan layanan pemerintah lainnya.

Secara umum, tugas pendamping adalah memberikan pengetahuan, dengan melakukan penyuluhan terus menerus kepada keluarga miskin dan rentan di daerahnya. Karena itu diperlukan konsep Satu Desa Satu Pendamping. Tugas dari pekerja sosial dan aparat yang mendapat tugas memberikan pendampingan.

3. Program menyediakan akses pekerjaan bagi pendapatan Transformasi mendorong penduduk miskin dan rentan untuk bisa naik kelas tidak cukup hanya dengan bantuan tunai dan pendampingan. Kelompok miskin dan rentan memerlukan upaya afirmatif memastikan akses mereka kepada pendapatan individu dan rumah tangga melalui jaminan pekerjaan.

Beberapa program yang dapat dilakukan contohnya ialah:

- a. Program Pembangunan & Pemeliharaan Infrastruktur
 Perdesaan yang bersifat padat karya. Alokasi dana
 Pemerintah diberikan kepada komunitas (dan bukannya ke
 pada kontraktor kerja Pemerintah)
- b. Jaminan hari kerja tahunan yang dapat dialokasikan oleh komunitas (desa/kelurahan) sesuai siklus di daerah (misalnya antarmusim panen, dsb)
- c. Program Peningkatan Ketrampilan bagi anggota rumah tangga miskin dan rentan
- d. Pelatihan di pusat-pusat pelatihan perdesaan (bagi tukang kayu, pekerja bangunan, dsb.)
- e. Pendampingan pemberian ketrampilan bagi penerima kredit usaha (Kredit Usaha Rakyat dan kredit mikro lainnya).

4. Pemberdayaan masyarakat

Keseluruhan program untuk menjamin akses di atas, semuanya diarahkan kepada individu dan rumah tangga. Namun harus diingat bahwa Indonesia memiliki sistem sosial yang berbeda. Komunitas merupakan satu kesatuan masyarakat yang juga perlu mendapatkan perhatian. Secara spesifik dalam hal menjamin akses, Pemerintah perlu mendorong program pemberdayaan masyarakat agar memastikan bahwa SUARA dari kelompok miskin dan rentan juga didengar dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat.

Kebijakan Fiskal dan Moneter mendukung seluruh proses transformasi

Kebijakan moneter dan fiskal harus dijalankan secara bersinergi.

Menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi dilakukan bersama oleh otoritas fiskal dan moneter. Ketika sisi fiskal melakukan ekspansi seharusnya didukung oleh kebijakan ekspansif dari sisi moneter. Sebaliknya, ketika dirasakan perekonomian tumbuh terlalu cepat sehingga mendekati overheating, maka sisi fiskal dan moneter keduanya harus mengeluarkan sinergi kebijakan yang memperlambat pertumbuhan.

Menjaga inflasi bukan hanya target dari kebijakan moneter. Inflasi juga harus dijaga melalui kebijakan fiskal dengan menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang maupun melakukan intervensi pasar untuk komoditas pangan tertentu secara tepat waktu. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi juga bukan hanya sekedar urusan kebijakan fiskal. Bank Indonesia juga harus lebih jeli dalam memonitor kondisi perekonomian (selain inflasi) agar suku bunga dapat dipakai sebagai instrumen untuk menjalankan kebijakan counter cyclical, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi ketika terjadi kelesuan ekonomi (atau memperlambat pertumbuhan ketika ekonomi kita tumbuh terlalu cepat). Otoritas moneter juga harus dapat meningkatkan efisiensi di sistem perbankan kita (termasuk meningkatkan persaingan), agar suku bunga pinjaman dapat turun ke tingkat yang lebih rendah dengan cepat, ketika suku bunga acuan diturunkan.

Sedangkan dari sisi fiskal, harus dipahami bahwa kebijakan fiskal adalah instrumen kebijakan pembangunan. Karena itu, alokasi APBN/APBD harus mencerminkan strategi pembangunan yang sedang diimplementasikan. Pemerintah juga harus dapat meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran, agar program-program pembangunannya dapat berjalan sesuai degan yang direncanakan dan daya dorong kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih signifikan.

Untuk membuat APBN lebih berkesinambungan, sisi pendapatan APBN harus ditingkatkan, salah satunya dengan peningkatan efisien-

si pengumpulan pajak. Dari sisi pengeluaran, untuk mendukung pertumbuhan pemerintah harus meningkatkan belanja untuk penyediaan infrastruktur utama. Hal ini dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan anggaran infrastruktur secara bertahap hingga mencapai 5% dari PDB. Sementara itu, subsidi dikembalikan sebagai instrumen perlindungan sosial dengan mengubah secara bertahap subsidi terhadap (harga) barang menjadi subsidi langsung kepada orang yang membutuhkan. Sementara itu, penerimaan dari komoditas sumber daya alam sebaiknya dipakai untuk investasi mutu modal manusia, infrastruktur dan modal sosial untuk memfasilitasi diversifikasi dan transformasi struktur industri.

Untuk memperkuat sisi pembiayaan dari anggaran kita, Indonesia harus dapat memonetize cadangan sumber daya alam. Kita juga harus melakukan deepening pasar surat utang negara dalam negeri, agar lebih memudahkan pemerintah dalam membiayai program pembangunan. Dan salah satu prinsip yang harus kita pegang dalam masalah pembiayaan adalah bahwa pinjaman pemerintah hanya dilakukan untuk pembiayaan investasi, bukan untuk pengeluaran rutin.

8 | Penutup

Bapak/Ibu Hadirin yang saya muliakan,

Demikianlah beberapa pemikiran yang dapat saya sampaikan terkait dengan tujuan kita mewujudkan Indonesia yang Maju, Berkeadilan dan Sejahtera Untuk Semua. Pemikiran-pemikiran tersebut saya harapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran mengenai pembangunan ekonomi Indonesia ke depan.

Saya juga mengharapkan agar pemikiran yang telah saya sampai-kan di muka dapat pula menjadi pokok bahasan lebih lanjut secara akademis, khususnya dalam bidang Ilmu Ekonomi. Seperti yang telah saya sampaikan, Ilmu Ekonomi adalah ilmu untuk pembangunan, untuk kesejahteraan. Menciptakan kesejahteraan adalah untuk Rakyat. Karena itu pembangunan ekonomi adalah transformasi sosial. Meningkatkan kesejahteraan penduduk adalah mendorong penduduk miskin, rentan, dan kelas menengah untuk memajukan taraf kehidupannya mendekati kelompok atas atau kaya.

Lebih dari itu, seperti yang juga telah sampaikan di muka, Ilmu ekonomi yang ujungnya untuk kesejahteraan, tidak bisa dilepaskan dari sintesa disiplin ilmu-ilmu lainnya. Ilmu ekonomi untuk kesejahteraan adalah bauran dari berbagai disiplin seperti ekonomi demografi, ekonomi geografi/regional, ekonomi pertanian, dan ekonomi makro (fiskal moneter), maupun ekonomi mikro (perusahaan maupun rumah tangga). Pendekatan masing-masing disiplin Ilmu Ekonomi yang terpisah dan parsial tidak bisa memecahkan persoalan pembangunan ekonomi menciptakan kemajuan dan kesejahte-

raan. Sintesis berbagai disiplin ekonomi tersebut akan menghasilkan pendekatan pembangunan ekonomi yang holistik bagi penciptaan kesejahteraan. Saya sungguh berharap ini menjadi kontribusi dari Pidato ini kepada Ilmu Ekonomi.



9

Ucapan Terima Kasih

Bapak/Ibu Hadirin yang saya muliakan,

Ijinkan saya mengakhiri Pidato Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa ini dengan penyampaian ucapan terima kasih.

Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah berkenan meringankan langkah menghadiri Upacara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa pada hari ini di Universitas Airlangga, Surabaya.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan Lembaga Negara dan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang selama ini telah menjadi mitra dalam berbagai kesempatan berdiskusi mengenai permasalahan Bangsa, dan juga berbagi alternatif solusi yang ada.

Secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan juga kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, atas persetujuan yang telah diberikan kepada Universitas Airlangga untuk menganugerahkan Gelar Doktor Honoris Causa ini kepada saya.

Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Ketua dan rekan-rekan saya di Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga untuk seluruh kebersamaan di MWA mendorong perbaikan terus menerus bagi Universitas Airlangga.

Selanjutnya, ijinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Rektor, Ketua Senat Akademik, segenap Pimpinan Universitas, dan seluruh Civitas Akademika Universitas Airlangga yang telah berkenan menganugerahkan Gelar Doktor Honoris Causa yang terhormat ini kepada saya. Saya secara khusus juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tim Promotor saya, yaitu Promotor Prof. Dr. Muslich Anshori, SE., MSc., Ak, CA., dan para Ko-Promotor Dr. Rudi Purwono, SE., MSE., dan Dr. Unggul Heriqbaldi, SE., MSi., MAppEc., beserta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang telah berkenan menelaah pemikiran-pemikiran saya dan mengajukan saya untuk memperoleh gelar terhormat ini.

Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kolega saya di Komite Ekonomi Nasional (KEN). Selama lebih dari tiga tahun terakhir, berbagai rapat dan diskusi yang dilakukan oleh KEN telah menjadi ajang diskusi memperdalam berbagai permasalahan serta solusi yang tersedia bagi Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan bagi semua. Berbagai perspektif, jangka pendek maupun jangka panjang, akademisi maupun pengusaha, pertanian maupun industri, ekonomi makro maupun kebijakan sosial, semua mewarnai rapat dan diskusi KEN - dan sebagian dari seluruh perspektif itu telah saya sampaikan kepada Bapak/Ibu sekalian dalam Pidato ini.

Saya juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, namun mereka telah bekerja keras sehingga memungkinkan kita semua mengikuti acara Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa pada hari ini dengan khidmat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras mensukseskan dua kali acara Kuliah Umum yang telah saya sampaikan sebelumnya, serta satu kali Seminar besar, yang merupakan satu rangkaian dengan acara Penganugerahan Gelar pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pembicara pada Seminar tersebut. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga saya. Kepada Ibu, saya haturkan terima kasih atas semua dorongan dan perhatian yang tulus sehingga saya bisa mendapatkan kehormatan ini. Akhirnya kepada istri dan anakanakku, saya ucapkan terima kasih mendalam untuk seluruh cinta dalam keluarga. Dalam doa, saya berharap Gelar ini juga menjadi inspirasi bagi anak-anakku mencapai cita-cita setinggi mungkin.

Bapak/Ibu Hadirin yang saya muliakan,

Demikianlah keseluruhan Pidato yang saya sampaikan dalam rangka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Airlangga kepada saya. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT. dalam upaya kita Menuju Indonesia Maju, Berkeadilan dan Sejahtera Untuk Semua. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Surabaya, 26 A<mark>gustus 20</mark>13. Chairul Tanjung

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertiningsih (2004). "Reshaping Populations" dalam Hull, T.H. (ed.), People, Population, and Policy in Indonesia, ISEAS.
- Adioetomo, Sri Moertiningsih (2005). Bonus Demografi: Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi. Pidato Pengukuhan Guru Besar FEUI, April 2005.
- Batten, D.F., dan Boyce, D.E. (1986). "Spatial Interaction, Transportation, and Interregional Commodity Flow Models" dalam Nijkamp, P. (ed.), Handbook of Regional and Urban Economics, Volume I, North-Holland, hal. 357-406.
- Chenery, H.B., dan Syrquin, M. (1975), Patterns of Development, 1957-1970, London: Oxford University Press.
- Dhanani, Shafiq, Iyanatul Islam, dan Anis Chowdhury (2009). The Indonesian Labour Market: Changes and Challenges. Routledge Studies in the Modern World Economy.
- Hill, Hal (1996). The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia's Emerging Giant, Cambridge.
- Hull, Terrence H. dan Valerie J. Hull (2004). "The Family Planning to Reproductive Health Care: A Brief History" dalam Hull, T.H. (ed.), People, Population, and Policy in Indonesia, ISEAS.
- Mason, Andrew, Ronald Lee, A. Tung, M. Lai, dan T. Miller (2009).
 "Population Aging and Intergenerational Transfers: Introducing Age into National Accounts, Developments in the Economics of Aging", dalam Wise, David (ed.) (National Bureau of Economic Research: University of Chicago Press), hal. 89-122.
- McKinsey Global Institute (2012). The Archipelago Economy: Unleasing Indonesia's Potential, September 2012.
- Nazara, Suahasil (2010). Pemerataan Antardaerah Sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan. Pidato Pengukuhan Guru Besar FEUI, Maret 2010.

- Soesastro, Hadi, Aida Budiman, Ninasapti Triaswati, Armida Alisjahbana, Sri Adiningsih, (2005). Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, Publikasi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
- Stiglitz, Joseph dan Shahid Yusuf, (2001). Rethinking The East Asia Miracle, World Bank Publication & Oxford University Press.
- Suleman, A., & Iqbal, Z. (2012). Infrastructure Development: Challenges and the Way Forward. In H. Hill, M. Khan, & J. Zhuang (Eds.), *Diagnosing the Indonesian Economy: Toward Inclusive and Green Growth* (pp. 227-274). Manila: Anthem Press dan Asian Development Bank.
- Susantono, Bambang (2009). Strategi Dalam Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Penerbit Kata Hasta Pustaka dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- World Bank (1993). East Asia Miracle: Economic Growth and Public Policy. World Bank Policy Research Report.
- Yayasan Indonesia Forum (2007). Visi Indonesia 2030. Jakarta.

CATATAN BELAKANG

World Bank (1993) mengelompokkan delapan perekonomian Asia Timur dalam East Asia Miracle. Namun tidak lama setelah pujian keajaiban tersebut, ternyata Asia Timur memasuki periode krisis ekonomi di akhir dekade 1990an. Untuk ulasan tersebut, lihat Stiglitz & Yusuf (2001).

"Sampai tahun 1999, Indonesia sudah melaksanakan enam kali Pelita dengan topik utama sebagai berikut:

Pelita I : Stabilitas ekonomi, seperti pengendalian inflasi

Pelita II : Penciptaan lapangan kerja

Pelita III : Swasembada pangan, pemerataan kesejahteraan
Pelita IV & V : Mengurangi ketergantungan pada sektor migas,

: Mengurangi ketergantungan pa<mark>da sekt</mark>or migas, deregulasi perbankan dan sektor riil

Pelita VI : Pemantapan diversifikasi dan i<mark>ntensif</mark>ikasi usaha

"Catatan penting di sini adalah bahwa survei seperti SUSENAS memiliki bias ke bawah untuk kelompok kaya. Sebabnya adalah konsumsi kelompok kaya yang sifatnya barang tahan lama biasanya tidak selalu tertangkap oleh survei yang lebih sensitif terhadap jenis konsumsi barang kebutuhan sehari-hari. Konsumsi barang tahan lama biasanya terjadi tidak secara rutin bulanan. Pembelian mobil ataupun perlengkapan rumah tangga, misalnya, biasanya bersifat tahunan. Karenanya tidak selalu terdata dalam kegiatan survei di satu titik waktu, walaupun survei tersebut telah menanyakan pengeluaran selama sebulan yang lalu.

Secara resmi, umur kerja dimulai pada usia 15 tahun. Karena itu survey seperti SUSENAS hanya menanyakan status pekerjaan (dan juga pendapatan) dari kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas. Namun realita di masyarakat sesungguhnya banyak pula penduduk di bawah usia 15 tahun yang bekerja.

PIDATO GURU BESAR MENUJU INDONESIA MAJU... CHAIRUL TANJUNG

- ^v Pada tahun 2010, penduduk Jawa mencapai 58% dari seluruh penduduk Indonesia, sementara penduduk di Pulau Sumatera adalah sekitar 21%. Hal tersebut berarti sekitar 80% dari penduduk Indonesia tinggal di dua pulau besar saja, yaitu Jawa dan Sumatera.
- vi Jawa sudah mulai mengalami hal ini. Daya dukung lingkungan sudah mendekati ambang batas toleransi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kota di Pulau Jawa yang menghadapi ancaman banjir di waktu-waktu tertentu, namun penduduknya pada saat yang sama menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih.
- vii Di Jawa penetrasi komputer telah mencapai 67% dan internet sebesar 70% dari total rumah tangga. Hal ini sangat kontras dengan tingkat penetrasi komputer dan internet di Sumatera (16,6% komputer dan 16,8% internet), Kalimantan (5,9% dan 4,7%), ataupun Maluku-Papua yang hanya 1,5% dan 1,2%.
- viii Program bantuan (transfer) tunai menyediakan anak tangga bagi satu keluarga miskin dan rentan yang (ibaratnya) ada dalam lubang yang cukup dalam. Sebelum mereka bisa menolong dirinya sendiri, keluarga tersebut harus keluar terlebih dahulu dari lubang tersebut.



Chairul Tanjung

- PENDIRI DAN CHAIRMAN CT CORPORA
- KETUA KOMITE EKONOMI NASIONAL

DATA PRIBADI

Nama

Tempat/Tanggal Lahir

Agama

Status

Alamat Rumah

Alamat Kantor

: Chairul Tanjung

: Jakarta, 18 Juni 1962

: Islam

: Menikah/Nama Istri:

drg. Anita Ratnasari, MARS 2 anak : Putri Indahsari dan

Rachmat Dwiputra

: Jl Teuku Umar No 50, RT001/RW001,

Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat

: Menara Bank Mega

Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A,

Jakarta 12790

RIWAYAT PENDIDIKAN

1975	Tamat Sekolah Dasar Van Lith, Jakarta
1978	Tamat Sekolah Menegah Pertama Van Lith, Jakarta
1981	Tamat Sekolah Menengah Atas Negeri I Boedi Oetomo,
	Jakarta.

Lulus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia 1987 Mengikuti Program MBA Eksekutif Angkatan XIA dari 1991-1993

Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen

(IPPM), Jakarta PIDATO GURU BESAR MENUJU INDONESIA MAJU... **CHAIRUL TANJUNG**

KARIR

1981-87

Memulai beberapa bisnis sejak duduk di tahun pertama kuliah di Universitas Indonesia. Bisnis yang ditekuni bersifat informal seperti menjual kaos, tas, dan stiker. Kemudian berkembang menjadi usaha fotocopy, alat dan bahan kuliah kedokteran gigi, jual beli mobil bekas, dan usaha kontraktor.

1987-94

Memulai usaha formal dengan mendirikan Perseroan Terbatas (PT) yang bertujuan mengembangkan industri kecil yang bergerak dalam pembuatan alas kaki (sepatu dan sandal). Kemudian berkembang dengan mendirikan industri genteng metal, industri kertas, dan kawasan industri sebagai cikal bakal berdirinya Para Group.

1994

Mendirikan p<mark>erusah</mark>aan pembiayaan Para Multi <mark>Financ</mark>e yang merupakan cikal b<mark>akal ind</mark>ustri keuangan di CT Cor<mark>pora.</mark>

1996

Mengambil alih Bank Karman, awalnya berpusat di Surabaya, dan mengubah namanya menjadi Bank Mega. Saat ini Bank Mega adalah salah satu bank nasional terkemuka dengan aset lebih dari Rp 65 triliun dan lebih dari 320 cabang. Bank Mega adalah bank dengan pertumbuhan bisnis kartu kredit tercepat di Indonesia.

1998

Mulai mengembangkan usaha di sektor properti melalui pembangunan Bandung SuperMal yang akhirnya dibuka pada tahun 2001. Mengambil alih Indovest Securities dan mengubah namanya menjadi Mega Capital.

2000

Mendirikan Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV). Trans TV merupakan salah satu stasiun TV nasional terbesar dengan market share lebih dari 12%.

2001

Mengambil alih Bank Tugu yang akhirnya dikonversikan menjadi Bank Syariah dengan nama Bank Syariah Mega Indonesia yang kemudian berubah menjadi Bank Mega Syariah. Bank Mega Syariah merupakan bank syariah swasta pertama di Indonesia.

2003

Mendirikan Asuransi Jiwa Mega Life dengan bermitra dengan Sinar Mas Group. Mega Life termasuk dalam tiga besar asuransi jiwa di Indonesia dalam hal perolehan premi bersih.

2006

Mengakuisisi 55% saham Tivi Tujuh yang kemudian ditransformasikan menjadi Trans7 dengan mitra Kompas Gramedia. Trans7 mampu membukukan laba pada tahun pertama sejak diambil alih oleh CT Corpora setelah mengalami kerugian selama 5 tahun sejak stasiun ini didirikan.

Memperoleh franchise Coffee Bean & Tea Leaf.

2007

Mengambil alih high-end fashion retailer, PT Mahagaya dan mentransformasikan menjadi Trans Fashion. Trans Fashion saat ini mengontrol lebih dari 30 high-end brands di Indonesia dan Thailand. Memperoleh franchise Baskin Robbins dan mengambil alih Anta Tour & Travel Services. Anta & Vaya Tour saat ini adalah travel agency terbesar di Indonesia.

Mendirikan Mega Auto Finance dan Mega Central Finance yang bergerak dalam pembiayaan sepeda motor.

2008

Mengakuisisi Metro Department Store dan memperluas jaringan usaha fashion ke ke Thailand dengan bendera Trans Fashion Thailand.

2009

Membuka Trans Studio Makassar dengan bermitra dengan Kalla Group.

2010

Membeli 40% saham PT Carrefour Indonesia dari Carrefour S.A.(Perancis). Carrefour saat ini mengontrol lebih dari 40% market share di segmen hypermarket.

Membuka Trans Studio Bandung, theme park indoor terbesar di Asia Tenggara.

2011

Mengakuisisi usaha digital media Detik.com dan fast food chain Wendy's. Detik.com adalah portal news terbesar di Indonesia dengan hampir 10 juta unique visitor per hari.

Mentransformasikan Para Group menjadi CT Corpora.

2012

Membuka kawasan terpadu Trans Studio di Bandung termasuk didalamnya adalah Trans Studio Bandung, Trans Studio Mall, Trans Luxury Hotel dan Ibis Hotel.

Membeli 10.9% saham di Garuda Indonesia.

Mengakuisisi sisa 60% saham PT Carrefour Indonesia dan menjadikannya perusahaan ritel dengan 100% kepemilikan nasional.

PAPARAN/ KARYA TULIS ILMIAH

PAPARAN

- Advancing Collaborative Strategy for Excellence disampaikan pada acara ASAIHL Conference di Universitas Airlangga, Mei 2013.
- Optimalisasi Program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan (P4S) disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, April 2013.
- Indonesia: Well Poised For Sustainable Economic Growth disampaikan pada Asian Investment Conference yang diselenggarakan oleh Credit Suisse di Hong Kong, Maret 2013.
- Pertanian, Komoditas Pangan dan Solusinya disampaikan dalam Sidang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional, Maret 2013.
- Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disampaikan dalam Sidang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional, Maret 2013.
- Pengelolaan Subsidi BBM disampaikan dalam Sidang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional, Maret 2013.
- Wajah Perekonomian Indonesia Tahun 2013 dan Peran Perpajakan di dalam Pembangunan disampaikan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Februari 2013.
- APBN dan Kebijakan Fiskal Indonesia Tantangan dan Rekomendasi disampaikan pada Sidang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional, Januari 2013.
 PIDATO GURU BESAR MENUJU INDONESIA MAJU... CHAIRUL TANJUNG

- Mengatasi Kartel Komoditas Pangan disampaikan pada Sidang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional, Januari 2013.
- Perbaikan Kesenjangan dan Penanggulangan Kemiskinan disampaikan pada Sidang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional, Januari 2013.
- Peningkatan Peran Pengusaha Pemula dan Lokal dalam Perekonomian disampaikan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh HIPMI di Bali, Desember 2012.
- Kepemimpinan Komunikasi dalam Era Transparansi disampaikan pada Luncheon Talk yang dilaksanakan oleh Perhumas, Desember 2012.
- Entrepreneurship in South East Asia disampaikan pada Emerging Market Leadership Forum yang diselenggarakan oleh Credit Suisse di Bali, November 2012.
- Arah Penguasaan Teknologi (Menuju 2025 dan 2050) disampaikan pada Kongres Persatuan Insinyur Indonesia, November 2012.
- Membangun kewirausahaan guna membawa Indonesia menuju Kancah Dunia. Orasi ilmiah disampaikan pada Rapat Terbuka Senat Universitas Airlangga, Dies Natalis ke 58, November 2012.
- Masa Depan Indonesia Incorporated disampaikan pada International Conference of Futurology di Jakarta, October 2012.
- Strategi Pengembangan Ekonomi Dalam Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal disampaikan pada forum Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Oktober 2012.

- Crossing The Lead disampaikan pada Forbes Global CEO Conference di Dubai, UAE, Oktober 2012.
- Tiger Cubs of the ASEAN economy Are they ready to fulfill their role in the global and Asian economy? disampaikan pada ING CEO Forum di Singapore, Oktober 2012.
- Role of Business Community in Accelerating Implementation of ASEAN Economic Community disampaikan pada ABC Gala Dinner yang diselenggarakan oleh ASEAN Business Club, September 2012.
- Transformational Leadership dalam Mencapai Visi Pembangunan Indonesia disampaikan pada forum SESPIBI Bank Indonesia, Juli 2012.
- How to Manage Diaspora: The Way Forward disampaikan dalam Congress of Indonesia Diaspora di Los Angeles, USA, Juli 2012.
- Indonesia: Well poised for sustainable economic growth disampaikan dalam Board of Directors Meeting US ASEAN Business Council, Juni 2012.
- Memacu Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Merata disampaikan pada Sidang Kabinet Indonesia Bersatu II dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Ekonomi Nasional, Mei 2012.
- Indonesia's Economic Prospect disampaikan dalam forum Dutch Chamber of Commerce meeting, Februari 2012.
- Entrepreneurship and Innovation: Engine of Future Growth disampaikan pada ASEAN Business and Investment Summit, November 2011.
- Prospek dan Tantangan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Global disampaikan pada forum Lemhanas, September 2011.

- Vision of Indonesia's Economy and the Role of Science and Technology as Key Enablers disampaikan pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang diselenggarakan oleh Kemenristek, Agustus 2011.
- Indonesia The World's Next Economic Power disampaikan pada International Conference of Futurology, Juli 2011.
- Peran Wirausahawan Nasional dalam Visi Ekonomi Indonesia 2025 disampaikan pada forum pertemuan PBNU, Juli 2011.
- Building a National Brand: Powering Growth through Culture disampaikan pada World Economic Forum, Juni 2011.
- Tinjauan dan Prospek Ekonomi Indonesia disampaikan di Universitas Gajah Mada, April 2011.
- Leadership dan Entrepreneurship untuk Mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera disampaikan di Bank Indonesia, Maret 2011.
- BUMN Sebagai Agen Perubahan Pada Pembangunan Ekonomi Indonesia disampaikan di Kementrian BUMN, Februari 2011
- Inovasi dan Kreativitas untuk mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia disampaikan di ITB, Februari 2011.
- Membangun Spirit Entrepreneurship yang Nasionalistik disampaikan di Jawa Post, Februari 2011.
- Visi Indonesia 2030 Menuju Indonesia Maju Melalui Peningkatan Jati Diri Bangsa dan Ketahanan Pangan disampaikan pada Dies Natalis IPB di Bogor, Oktober 2010.
- Economic Outlook for Indonesia from Media Industry's Point of View disampaikan di Asia Pacific Media Forum, Juni 2010.

 PIDATO GURU BESARMENUJU INDONESIA MAJU... CHAIRUL TANJUNG

KARYA TULIS / BUKU

2012

Chairul Tanjung: *Si Anak Singkong* (Otobiografi) diterbitkan Penerbit Buku Kompas

ORGANISASI PROFESI DAN AKTIVITAS SOSIAL

1998 - 2000

Anggota Komite Kemanusiaan Indonesia.

1999 - 2004

Pengurus Palang Merah Indonesia Pusat.

2000 - 2004

Ketua Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia.

2004

Mendirikan Rum<mark>ah Anak</mark> Madani (RAM) yang d<mark>itujukan</mark> untuk menampung anak-anak k<mark>orban tsunami</mark> Aceh.

2007

Beserta istri, Ibu Anita Ratnasari, mendirikan CT Foundation, sebuah yayasan dengan visi utama memerangi kemiskinan melalui program pendidikan. Pada tahun 2010, CT Foundation mendirikan SMA Unggulan di Sumatera Utara yang memberikan beasiswa penuh bagi siswa SMP/MTs yang miskin dan berprestasi guna bersekolah di SMA CT Foundation.

2006 - 2013

Ketua Yayasan Indonesia Forum.

2006 - sekarang

Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga.

2008 - sekarang

Ketua Yayasan Ginjal Nasional.

2010 - sekarang

Wakil Ketua Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia

PENUGASAN NEGARA

1999

Anggota Delegas<mark>i Asia-Europe Business Forum (A</mark>EBF). Keputusan Presiden RI No<mark>.171/M</mark> Tahu<mark>n 1</mark>999 tanggal 27 Mei 1999.

2001

Anggota Del<mark>egasi A</mark>sia-Europe Business Forum (AEBF). Keputusan Presiden RI No.297/M Tahun 2001 tanggal 14 November 2001.

2008

Ketua Harian Panitia Nasional 100 tahun Kebangkitan Nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Panitia Peringatan 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional.

2011

Wakil Ketua Harian II Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025. Peraturan Presiden RI No.32 Tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 - 2025.

2012

Wakil Ketua Panitia Nasional Penyelenggara KTT APEC XXI Tahun 2013. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 22 Tahun 2012 tentang Panitia Nasional Penyelenggara KTT APEC XXI Tahun 2013.

PIDATO GURU BESARMENUJU INDONESIA MAJU... CHAIRUL TANJUNG

2010 - sekarang

Ketua Komite Ekonomi Nasional. Peraturan Presiden RI No. 31 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional.

PENGHARGAAN

Mahasiswa Teladan Tingkat Nasional	(1984-1985)
• Pembina Olahraga Terbaik versi SIWO PWI	(2003)
Marketer of the Year dari MarkPlus	(2007)
Banker of the Year dari Globe Asia	(2008)
• Entrepreneu <mark>r of the Year da</mark> ri Enterprise Asia	(2009)
• Indonesia's Rising Star dari Forbes	(2010)
• Tokoh Pengu <mark>saha Syaria</mark> h dari <i>Masyarakat Eko<mark>nomi</mark></i> S	yariah (2010)
• Man of the Yea <mark>r dari</mark> Globe Asia	(2011)
 Soegeng Sarjadi Award on Good Governance dari Soegeng Sarjadi School of Government 	(2012)
• The Captain of Industry dari "the 6th International Conference of the Asian Academy of Applied Busine (AAAB)	
• The Most Inspiring Alumni dari Fakultas Kedokterar Gigi Universitas Indonesia	(2013)